



2-7-'99

H

KI

447/KI/99/10/25

370.12 sub p0

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LPM IKIP PADANG**

**PENYULUHAN PELAKSANAAN PENGAJARAN
BIDANG STUDI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
DI SMU SWASTA KOTAMADYA PADANG**

Oleh :
Drs. Syakwan Lubis
Drs. Akmal, M.Si.
Aldri Frinaldi, S.H.

Dilaksanakan Atas Biaya
Dana DIK Suplemen IKIP Padang TA. 1998/1999
Nomor Kontrak : 22/K12.3/PM/1999
Tanggal : 1 Pebruari 1999

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
1999**

RINGKASAN

PENYULUHAN PELAKSANAAN PENGAJARAN BIDANG STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMU SWASTA KOTAMADYA PADANG

Drs. Syakwan Lubis, dkk.

Masalah utama yang dihadapi oleh guru bidang studi PPKN setelah terjadinya gelombang reformasi di Indonesia adalah kesulitan dalam hal pengembangan materi ajar. Hal ini karena P-4, dimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selama ini dijadikan sebagai pokok bahasan telah dicabut berdasarkan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Disamping itu guru PPKN juga menemui berbagai kendala dalam hal merencanakan program pengajaran, menggunakan media dan sumber belajar, pemilihan metoda yang tepat serta bagaimana cara mengevaluasi sikap sebagai sasaran utama dari proses pembelajaran PPKN.

Program ini bertujuan untuk membantu guru bidang studi PPKN khususnya di SMU Swasta se-Kotamadya Padang mengembangkan wawasan tentang berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dewasa ini. Selain itu dimaksudkan pula untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar.

Kerangka pemecahan masalah yang digunakan berupa pemberian materi wawasan dan keterampilan mengembangkan desain proses belajar mengajar yang meliputi perencanaan pengajaran, penggunaan media dan sumber belajar, pemilihan metoda yang tepat serta bagaimana mengevaluasi sikap.

Adapun metode yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Hasil evaluasi menunjukkan : (1) adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pengembangan materi ajar PPKN serta PBM-nya. Hal ini dapat dideteksi dari dialog yang terjadi antara peserta dengan tim penyuluh, (2) semua peserta menunjukkan keaktifan, kesungguhan serta ketekunan terhadap semua rangkaian kegiatan yang dilakukan.

TIM PELAKSANA

DRS. SYAKWAN LUBIS

DRS. AKMAL, M. Si.

ALDRI FRINALDI, S.H.

DRS. RUSLI

DRA. AINA

DRS. SURYANEF

DRA. AL RAFNI, M. Si.

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan laporan tentang *Penyuluhan Pelaksanaan Pengajaran Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMU Swasta Kotamadya Padang.*

Penyuluhan ini dilaksanakan oleh suatu Tim, yang terdiri dari *Drs. Syakwan Lubis, Drs. Akmal, M.Si., Aldri Frinaldi, S.H., Drs. Rusli, Dra. Aina, Drs. Suryanef, serta Dra. Al Rafni, M.Si.*

Terselenggaranya penyuluhan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak diantaranya LPM IKIP Padang, Dekan FPIPS IKIP Padang, serta Pimpinan Jurusan PPKN FPIPS IKIP Padang. Oleh karena itu pada kesempatan ini tim pelaksana mengucapkan terima kasih.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Kakanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat, Kepala SMU Swasta se-Kotamadya Padang yang telah memberikan kesempatan kepada tim pelaksana dan telah memberikan sambutan dan bantuan yang amat berkesan. Tidak lupa pula terima kasih juga disampaikan kepada guru-guru bidang studi PPKN yang telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini.

Kami percaya laporan ini bermanfaat bagi banyak pihak, terutama bagi Staf Pengajar Jurusan PPKN FPIPS IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMU.

Padang, Mei 1999

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
TIM PELAKSANA	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Perumusan Masalah	3
II. TUJUAN DAN MANFAAT	4
A. Tujuan	4
B. Manfaat	4
III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH	6
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	8
A. Realisasi Masalah	8
B. Khalayak Sasaran	12
C. Metode Yang Digunakan	13
V. HASIL DAAN PEMBAHASAN	15
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : **Susunan Personalia** Penyuluhan Pelaksanaan Pengajaran Bidang Studi PPKN Bagi Guru-guru SMU Swasta Kotamadya Padang
- Lampiran 2 : **Jadwal Kegiatan** Penyuluhan Pelaksanaan Pengajaran Bidang Studi PPKN Bagi Guru-guru SMU Swasta Kotamadya Padang
- Lampiran 3 : Makalah **Guru PPKN dan Reformasi Politik** oleh **Dra. Al Rafni, M. Si.**
- Lampiran 4 : Makalah **Perencanaan Pengajaran PPKN** oleh **Dra. Aina**
- Lampiran 5 : Makalah **Memfungsionalisasikan Strategi Belajar Mengajar PPKN Melalui Metoda VCT** oleh **Drs. Suryanef**

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pembangunan dapat diartikan sebagai peningkatan nilai tambah antara lain pada bidang pendidikan, yaitu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, maju dan mandiri. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap dunia pendidikan, terutama pendidikan pada tingkat SMU serta upaya mewujudkan perluasan kesempatan belajar.

Dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dan perluasan kesempatan belajar pada tingkat SMU, faktor guru sangat memegang peranan penting (terutama pada SMU Swasta). Hal ini disebabkan oleh realitas menunjukkan bahwa guru merupakan "aktor sekaligus sutradara" bagi keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukannya. Sehubungan dengan hal tersebut, tenaga pengajar SMU Swasta mendapat kendala dalam pembelajaran bidang studi khususnya bidang studi PPKN.

Timbulnya kendala dalam proses pembelajaran bidang studi PPKN karena terjadinya berbagai perubahan dalam ketatanegaraan dewasa ini, terutama yang berkaitan dengan reformasi politik. Disamping itu juga karena kekurangan

dalam hal dukungan sarana dan prasarana penunjang dalam pembelajaran bidang studi tersebut.

Dalam konteks reformasi kehidupan kenegaraan kita, implikasinya sangat dirasakan dalam proses pembelajaran bidang studi PPKN. Hal ini disebabkan oleh dicabutnya Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa yang lebih dikenal dengan P-4 dalam Sidang Istimewa MPR 1998 berdasarkan Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998. Pencabutan P4 menjadikan kebanyakan guru bidang studi PPKN menjadi "bingung" dalam mentransformasikan materi ajar. Sebab selama ini nilai-nilai yang tercakup dalam P-4 merupakan pokok bahasan dari bidang studi PPKN. Disamping itu juga dirasakan banyak sekali hal-hal yang tidak relevan lagi dengan keadaan aktual sekarang ini.

Permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru bidang studi PPKN ini terungkap saat diadakannya Seminar dan Lokakarya **Tinjauan Kritis Materi Ajar PPKN dan Tata Negara SLTP dan SMU Pasca Sidang Istimewa MPR se-Sumatera Barat** yang diselenggarakan oleh Jurusan PPKN FPIPS IKIP Padang tanggal 1 - 2 Maret 1999 yang lalu.

Berangkat dari realitas di atas, maka IKIP Padang melalui Jurusan PPKN melakukan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan atau penataran kepada guru-guru

yang mengajar bidang studi PPKN dalam upaya meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan afeksi PPKN. Langkah ini ditempuh juga dalam rangka menghadapi terjadinya paradigma baru dalam kehidupan kenegaraan seperti yang diamanatkan dalam Sidang Istimewa MPR . Hal inilah yang merupakan faktor pendorong bagi staf pengajar Jurusan PPKN FPIPS IKIP Padang melalui LPM IKIP Padang melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

B. Perumusan Masalah

Kondisi perubahan paradigma kenegaraan RI dari Orde Baru ke Era Reformasi, menuntut adanya perbaikan terhadap miskonsepsi materi ajar PPKN dan sekaligus perbaikan dalam proses belajar mengajar. Berhadapan dengan itu, yang dijadikan rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah kurang memadainya kemampuan guru PPKN dalam hal :

1. Merencanakan program pembelajaran.
2. Mengembangkan materi ajar.
3. Menentukan media dan sumber belajar.
4. Memilih metode/strategi pembelajaran.
5. Mengevaluasi pembelajaran.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki materi ajar PPKN serta kemampuan dalam proses belajar mengajar bagi guru-guru SMU Swasta dalam bidang studi PPKN. Secara terperinci yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan guru dalam hal-hal berikut :

1. Membuat perencanaan pengajaran.
2. Mengembangkan materi ajar berdasarkan kurikulum.
3. Menetapkan strategi pengajaran.
4. Membuat dan menggunakan media pengajaran.
5. Mengevaluasi pembelajaran.

B. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh guru bidang studi PPKN SMU Swasta Kodya Padang dari kegiatan ini adalah memperkaya wawasan keilmuan PPKN yang pendekatannya multi disiplin itu sekaligus memperbaiki kesalahan konsep materi ajar yang selama Orde Baru lebih berorientasi terhadap "pemujaan" rezim yang berkuasa serta mendiskreditkan kelompok

tertentu. Di samping itu untuk membangun sikap ilmiah bagi guru dan melihat fakta kehidupan kenegaraan secara objektif. Kemudian penyuluhan itu dapat digunakan untuk menjembatani komunikasi antar guru PPKN sebagai alumni IKIP Padang dengan dosen yang membina mereka selama ini. Kerjasama ini sengaja dibangun antara Kanwil Depdikbud sebagai pembina guru di lapangan dengan IKIP sebagai lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan.

Kanwil Depdikbud Tingkat I Sumatera Barat melalui Kepalaanya (Drs. Basri AS., M.M.) meminta peranan IKIP Padang untuk memperbaiki kualitas pengajaran di lapangan, terutama materi ajar PPKN yang di masa pemerintahan Orde Baru dikungkung dengan buku paket yang membawa kesan diberi "**kacamata kuda**", sehingga pola pikir anak dirusak, siswa dituntut menghafal butir-butir P4 secara berurutan. Oleh karena itu kebebasan berpikir siswa harus dikembalikan. Untuk mencapai misi ini, maka lembaga yang mampu mengembalikan kondisi ini adalah perguruan tinggi dalam hal ini adalah IKIP Padang.

III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan miskonsepsi materi ajar PPKN di tingkat SMU diperbaiki dengan melakukan analisis materi terutama terhadap buku paket mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, termasuk buku penunjang yang dibaca guru sebagai penuntun dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terhadap kelangsungan proses pembelajaran juga diperbaiki melalui penyuluhan yang terlebih dahulu memberikan beberapa makalah oleh Tim Dosen Penyuluh PPKN. Bentuk penyuluhan yang dilakukan antara lain : dalam bentuk kulponasi, ceramah tanya jawab, diskusi dan saling bertukar informasi dengan guru PPKN. Guru-guru diberi kebebasan mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi, kemudian dicarikan solusinya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan antisipasi yang dilakukan oleh tim penyuluh antara lain :

1. Khalayak sasaran diberi informasi tentang materi ajar PPKN SMU yang telah dianalisis dan mengadakan dialog terbuka terhadap konsep-konsep yang diragukan dalam pembahasan pengajaran. Terhadap konsep yang terkait dengan disiplin ilmu lain yang

kurang dipahami guru, kepada guru diberikan konsep-konsep dasar seperti disiplin ilmu ekonomi, agama, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, dan sebagainya.

2. Khalayak sasaran dimotivasi dan diberi jiwa **entrepreneurship** untuk memiliki semangat dalam pengajaran PPKN, sehingga pengajaran menjadi disukai subjek didik. Pemahaman materi ajar PPKN tidak cukup melalui buku paket atau buku pegangan guru. Buku tersebut tidak akan memadai dalam memahami materi ajar PPKN. Guru dituntut bisa bekerja sama dengan guru disiplin ilmu lain. Untuk itu kepada guru ditanamkan sistem komunikasi sesama pengajar dan cara memanfaatkan sumber belajar yang lain.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, maka Tim Penyuluhan Pembelajaran PPKN IKIP Padang melakukan beberapa tahap kegiatan dalam rangka pelaksanaan program. Tahap-tahap pelaksanaan penyuluhan ini secara garis besar dibagi ke dalam dua tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan

Berdasarkan persetujuan Kepala LPM IKIP Padang, maka Tim Pelaksana melakukan pengurusan administrasi untuk mendapatkan izin dan rekomendasi untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat di SMU Swasta se-Kotamadya Padang.

Prosedur pengurusan izin kegiatan ini dimulai dari Kakanwil Depdikbud Tingkat I Sumatera Barat sampai ke guru bidang studi PPKN seluruh sekolah SMU Swasta melalui kepala sekolah masing-masing. Dalam pertemuan dengan Kakanwil juga dibicarakan teknis pelaksanaan penyuluhan. Pengurusan

reformasi politik) maka **Dra. Al Rafni, M.Si.** bertugas memberikan materi yang berjudul **Guru PPKN dan Reformasi Politik**. Untuk perbaikan miskonsepsi materi ajar PPKN disampaikan oleh **Drs. Akmal, M.Si.** Sementara itu kepada **Dra. Aina** dipercayakan untuk menyampaikan aspek-aspek yang berhubungan dengan **Perencanaan Pengajaran**. Selanjutnya **Drs. Syakwan Lubis** dan **Drs. Suryanef** mendapat bagian dalam hal yang berkaitan dengan **Media Pengajaran** dan **Strategi Belajar Mengajar**. Sedangkan untuk **Evaluasi Pengajaran** disampaikan oleh **Drs. Rusli**.

b. Penentuan Peserta

Masalah kedua yang dibicarakan dalam diskusi Tim adalah menentukan peserta yang akan diundang. Setelah didiskusikan, maka peserta penyuluhan adalah semua guru-guru PPKN SMU Swasta di Kotamadya Padang yang diwakili oleh satu orang, dengan jumlah total 26 orang.

c. Jadwal Kegiatan dan Pembagian Kerja

Masalah selanjutnya yang dibicarakan oleh Tim adalah jadwal kegiatan dan pembagian kerja anggota. Adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada lampiran ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pembelajaran PPKN bagi guru SMU Swasta se-Kotamadya Padang dilaksanakan selama satu hari penuh pada hari Sabtu, tanggal 17 April 1999. Acara ini dibuka secara resmi oleh LPM IKIP Padang yang diwakili oleh staf ahli bidang pelayanan masyarakat (**Drs. Akmal, M.Si.**). Sedangkan pembawa acara dipimpin oleh **Drs. Suryanef.**

Setelah berakhir acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyajian materi penyuluhan yang diberikan oleh Tim Penyuluh dari Jurusan PPKN FPIPS IKIP Padang sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing. Adapun materi yang disajikan dalam penyuluhan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

No.	Materi Penyuluhan	Penyaji	Waktu
1.	Guru PPKN dan Reformasi Politik	Dra. Al Rafni, M.Si	90 menit
2.	Perencanaan Pengajaran	Dra. Aina	90 menit
3.	Perbaikan Miskonsepsi Maateri Ajar PPKN	Drs. Akmal, M.Si.	90 menit
4.	Media dan Sumber Belajar PPKN	Drs. Syakwan Lubis	60 menit
5.	Memfungsionalisasikan Strategi Belajar Mengajar PPKN Melalui Metoda VCT	Drs. Suryanef	60 menit
6.	Evaluasi Belajar PPKN	Drs. Rusli	60 menit

PEKAMP
ACARA

Setelah selesai penyajian materi penyuluhan maka diadakanlah diskusi dan tanya jawab antara peserta dan tim penyaji. Dalam acara ini peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan pembelajaran PPKN di lapangan sesuai dengan pengalaman masing-masing guru tersebut. Setelah acara diskusi dan tanya jawab selesai, maka pukul 17.45 WIB ditutup acara ini oleh Ketua Pelaksana (**Drs. Syakwan Lubis**). Pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

B. Khalayak Sasaran

Sesuai dengan rencana sebelumnya peserta penyuluhan diharapkan terdiri dari semua guru PPKN SMU Swasta Kotamadya Padang, tetapi karena keterbatasan tempat maka yang menghadiri diwakili satu orang untuk satu sekolah. Sedangkan Tim Penyuluhan pada awalnya hanya tiga orang (**Drs. Sykawan Lubis, Drs. Akmal, M.Si., dan Aldri Frinaldi, S.H.**).

Selanjutnya, mengingat kebutuhan penyuluhan serta upaya untuk meningkatkan wawasan yang lebih luas bagi khalayak sasaran, maka tim ini disempurnakan dengan penambahan anggota. Adapun anggota yang ditambah tersebut

adalah **Dra. Aina, Drs Rusli, Drs. Suryanef** dan **Dra. Al Rafni, M.Si.**

C. Metode Yang Digunakan

Metode penyampaian penyuluhan pembelajaran PPKN bagi guru PPKN SMU Swasta Kotamadya Padang ini disesuaikan dengan materi dan tujuan serta latar belakang penyaji. Metode tersebut adalah :

1. Ceramah

Ceramah diberikan selama 30 menit untuk mengungkapkan konsep-konsep pembelajaran PPKN secara makro oleh masing-masing Tim Penyaji. Penyampaian dilakukan dengan menggunakan OHP serta makalah yang telah disiapkan sebelumnya. Alokasi waktu yang tersisa bagi setiap materi yang disajikan digunakan untuk tanya jawab dan diskusi.

2. Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi, teori maupun konsep-konsep PPKN serta mengungkapkan permasalahan yang dialami guru di lapangan. Metode ini sangat efektif karena dapat membangkitkan semangat peserta dan memadai dalam membantu upaya mencapai tujuan kegiatan penyuluhan.

3. Diskusi

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan kasus-kasus materi ajar dan proses belajar mengajar pembelajaran PPKN, kemudian Tim Penyuluhan PPKN membantu mencarikan solusinya.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil yang telah dicapai setelah pelaksanaan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Hasil yang dimaksud itu akan ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

1. Pencapaian tujuan.
2. Sasaran.
3. Manfaat.

1. Pencapaian Tujuan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini yaitu agar guru-guru dapat memperbaiki miskonsepsi materi ajar PPKN di SMU dan meningkatkan proses belajar mengajar dalam kelas. Secara umum keseluruhan tujuan yang diharapkan tercapai dengan baik dimana :

- a. Para peserta penyuluhan telah memiliki pemahaman sekaligus dapat memperbaiki materi ajar PPKN di SMU. Disamping itu juga dapat meningkatkan proses belajar mengajar dalam pembelajaran PPKN.

b. Selama kegiatan berlangsung, semua peserta yang hadir memperlihatkan kesungguhan dan ketekunan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir acara penyuluhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keaktifan dari peserta dalam mengemukakan masalah dan jalan pemecahannya sesuai dengan standar pengajaran.

2. Pencapaian Sasaran dan Target

Sasaran dan target yang ingin dicapai dari kegiatan seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dapat dikatakan sudah tercapai, karena dalam kegiatan penyuluhan dapat dibina sebanyak 26 SMU Swasta se-Kotamadya Padang dalam peningkatan pembelajaran PPKN (ada yang diwakili satu orang untuk dua sekolah, karena yang mengajar adalah guru yang sama). Sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan sudah dapat memperbaiki miskonsepsi materi ajar PPKN dan peningkatan proses belajar mengajar PPKN bagi guru SMU, dengan harapan mereka dapat pula menularkan pengetahuannya ini kepada guru lain yang tidak bisa ikut dalam kegiatan penyuluhan ini.

447 / KI / 99 - p0 / 2]

370.12

lub

p0

3. Pencapaian Manfaat

Apakah penyuluhan ini benar-benar memberikan manfaat bagi guru-guru PPKN SMU Swasta Kotamadya Padang dalam memperbaiki materi ajar dan peningkatan proses belajar mengajar? Tentunya untuk mendapatkan jawaban yang valid dari pertanyaan ini diperlukan pemantauan jangka panjang dengan kajian tindak seperti penelitian tindakan kelas. Diharapkan penyuluhan ini dapat dimanfaatkan bagi peneliti tindakan kelas untuk memperbaiki pengajaran PPKN di tingkat SMU.

Berkaitan dengan manfaat kegiatan ini, menurut pernyataan peserta, kegiatan seperti ini bagi mereka sangat memberi manfaat, dan mereka meminta agar kegiatan ini diadakan terprogram sekali setiap semester. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan kegiatan ini akan ditindaklanjuti oleh Laboratorium PPKN melalui LPM IKIP Padang.

Berikut ini akan dikaji dan dianalisa tentang beberapa aspek yang erat kaitannya dengan keberhasilan kegiatan penyuluhan ini.

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah faktor yang dapat menunjang pelaksanaan penyuluhan diantaranya :

1.1 Minat dan Partisipasi Peserta

Menurut rencana, peserta yang akan mengikuti kegiatan ini sebanyak 52 orang, dimana satu sekolah diwakili oleh 2 orang guru PPKN. Tetapi setelah dikonsultasikan dengan Kakanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat dan Kepala SMU peserta, maka diharapkan kegiatan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar. Untuk keperluan itu maka setiap sekolah cukup diwakili oleh satu orang. Kondisi ini juga sesuai dengan Ruang Sidang FPIPS IKIP Padang, tempat di mana kegiatan berlangsung yang terbatas kapasitasnya. Selama kegiatan dapat dikatakan bahwa minat dan perhatian dari para peserta sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan respon yang positif dari para peserta.

1.2 Dukungan dari Pimpinan

Terlaksananya acara penyuluhan ini tidak luput dari dukungan yang amat besar dari seluruh pimpinan instansi yang terkait. Dukungan tersebut datang dari LPM IKIP Padang

maupun dari Kakanwil Depdikbud serta Kepala SMU Swasta se-Kotamadya Padang. Disamping itu hal yang tak mungkin dapat diabaikan adalah dukungan fasilitas yang diberikan oleh Dekan beserta staf FPIPS IKIP Padang.

1.3 Dukungan Tim Pelaksana

Sungguhpun imbalan berupa materi yang diterima tidak sebanding dengan tenaga yang telah diberikan, namun hal ini tidaklah mengurangi semangat dan kerja sama antar anggota tim pelaksana. Disamping itu tim dosen yang tergabung dalam kegiatan ini merupakan tim dosen yang berpengalaman di bidangnya.

b. Faktor Penghambat

Beberapa permasalahan yang dapat dikatakan sebagai faktor penghambat antara lain :

1.1 Keadaan SMU Swasta dan Guru yang Mengajar PPKN

SMU Swasta Kotamadya Padang tersebar di tiap kecamatan sehingga kesulitan dalam menghubungi sekolah dan juga jarang terjadi konsultasi di antara pengajar kecuali antar pimpinan sekolah. Guru yang mengajar bidang studi PPKN di SMU Swasta Kotamadya Padang ada yang berasal dari alumni

FKIP/STKIP Swasta di Sumatera Barat, sehingga mutu dan wawasannya juga berbeda dengan alumni IKIP Padang. Hal ini terungkap waktu dialog dengan para guru tersebut dengan tenaga penyuluh.

1.2 Terbatasnya Dana yang Tersedia

Keterbatasan dana yang ada pada setiap sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini mengakibatkan upaya dalam memperbanyak materi ajar yang sudah dianalisis oleh tim pelaksana tidak mungkin dilakukan. Tentunya hal ini turut mempengaruhi pencapaian sasaran yang lebih optimal.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil kegiatan penyuluhan perbaikan materi ajar dan peningkatan proses belajar mengajar PPKN bagi SMU Swasta Kotamadya Padang dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan sangat besar sekali manfaatnya. Manfaat ini berhubungan dengan peningkatan pengetahuan sekaligus memperbaiki kesalahan konsep dan peningkatan proses belajar mengajar PPKN.

Sikap antusias dan perhatian yang besar dari para peserta menunjukkan bahwa peserta merasa terobati dengan kegiatan penyuluhan ini. Karena dengan dicabutnya P-4 dan menempatkan Pancasila hanya sebagai Dasar Negara serta digantinya GBHN 1998 dengan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Nasional telah membawa implikasi terhadap guru PPKN dalam rangka pengembangan materi. Kegiatan penyuluhan ini untuk sementara dapat mensuplai materi yang sangat dibutuhkan para guru PPKN di SMU Swasta sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan proses belajar mengajar di era reformasi sekarang ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, antara lain :

Program perbaikan pengajaran PPKN ini terus diadakan sesuai dengan program LPM IKIP Padang. Karena materi ajar PPKN akan terus mengalami perbaikan dan pengembangan sejalan dengan formula kenegaraan yang ditawarkan. Disamping itu situasi global yang terjadi dewasa ini turut pula memberikan nuansa terhadap situasi dan kondisi negara Republik Indonesia. Semua ini akan membangun nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan yang muncul dari berbagai fenomena kenegaraan dan dunia global merupakan kajian dalam pengajaran PPKN dimasa yang akan datang. Oleh karena itu sejalan dengan permintaan guru-guru PPKN yang mengikuti kegiatan ini serta masih banyaknya yang belum terjangkau oleh kegiatan ini, maka kerja sama Laboratorium PPKN dengan LPM IKIP Padang dalam melanjutkan program ini merupakan suatu keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djahiri, A. Kosasih. (1996). *Strategi Pengajaran Afektif, Nilai dan Moral*. Bandung : IKIP Bandung.
- LPM IKIP Padang. (1998). *Panduan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Padang : IKIP Padang.
- Joni, T. Raka. (1980). *Pengembangan Kurikulum IKIP/IP/FKG Suatu Kasus Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi*. Jakarta.
- Utuh, Harun. (1996). *Proses Belajar Mengajar PPKN*. Suarabaya : Usaha Nasional.
- Sekretariat Negara RI. (1998). *Kumpulan Hasil Sidang Istimewa MPR RI 1998*.
- Kumpulan Hasil Dialog Guru-guru PPKN SLTP dan SMU se-Sumatera Barat yang dihimpun melalui *Seminar dan Lokakarya "Tinjauan Kritis Materi Ajar PPKN dan Tata Negara di SLTP dan SMU Pasca Sidang Istimewa MPR RI 1998"* yang diselenggarakan oleh Jurusan PPKN FPIPS IKIP Padang tanggal 1-2 Maret 1999.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SUSUNAN PERSONALIA
PENYULUHAN PELAKSANAAN PENGAJARAN
BIDANG STUDI PPKn
BAGI GURU-GURU SMU SWASTA DI KOTAMADYA PADANG**

No.	N A M A / N I P	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
1.	Drs. Syakwan Lubis / 130 906 450	Lektor Muda / III c	Ketua
2.	Drs. Akmal, M.Si. / 131 764 218	Lektor Madya / III d	Anggota
3.	Aldri Frinaldi, S.H. / 132 205 851	Asisten Ahli Madya / III a	Anggota
4.	Drs. Rusli / 130 280 098	Lektor Kepala Madya / IV b	Anggota
5.	Dra. Aina / 130 818 452	Lektor / IV a	Anggota
6.	Drs. Suryanef / 131 945 223	Lektor Muda / III c	Anggota
7.	Dra. Al Rafni, M. Si. / 132 056 198	Asisten Ahli / III b	Anggota

**JADWAL KEGIATAN PENYULUHAN PENGAJARAN
 BIDANG SUTDI PPKn
 BAGI GURU-GURU SMU SWASTA DI KOTAMDYA PADANG
 Tanggal : 17 April 1999**

Waktu	Kegiatan/Materi	Penanggung Jawab/Penyuluh
08.00 – 08.30	Pembukaan	Tim
08.30 – 10.00	Guru PPKn dan Reformasi Politik	Dra. Al Rafni, M.Si
10.00 – 10.15	Istirahat	Tim
10.15 – 11.45	Perencanaan Pengajaran PPKn	Dra. Aina
11.45 – 13.00	Istirahat	Tim
13.00 – 14.30	Pengembangan Materi	Drs. Akmal, M.Si
14.30 – 15.30	Media Pengajaran PPKn	Drs. Syakwan Lubis
15.30 – 15.45	Istirahat	Tim
15.45 – 16.45	Memfungsionalisasikan Strategi Belajar Mengajar PPKn Melalui Metoda VCT	Drs. Suryanef
16.45 – 17.45	Evaluasi Belajar PPKn	Drs. Rusli
17.45 – 18.00	Penutupan	Tim

Padang, 17 April 1999

Tim Penyuluh

GURU PPKn DAN REFORMASI POLITIK

Disampaikan Pada Penyuluhan Pengajaran Bidang Studi PPKn
Bagi Guru-Guru SMU Swasta di Kotamadya Padang
Tanggal 17 April 1999



Oleh :

Dra. AL RAFNI, M.Si

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
PADANG
1999

GURU PPKn dan REFORMASI POLITIK

Oleh : Dra. Al Rafni, M.Si.

A. Pendahuluan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diberikan pada jenjang persekolahan di Indonesia pada hakekatnya mengarahkan peserta didik pada pembentukan moral. Muara dari pembentukan moral tersebut ditampilkan dalam wujud perilaku yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru PPKn adalah personal yang dibebani kewajiban akademis untuk membantu peserta didik mengaktualisasikan sikap dan perilaku-perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak faktor yang mempengaruhi peserta didik untuk menyatakan sikap dan perilakunya. Satu diantaranya adalah faktor persepsi (Fremond E. Kast & J. E. Rosenzwich : 1970). Faktor persepsi yang dimaksud di sini adalah bagaimana persepsi peserta didik terhadap metode pengajaran pendidikan moral dan bagaimana persepsi peserta didik tersebut terhadap kondisi objektif atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekelilingnya (dalam hal ini reformasi politik).

Sudah bukan rahasia lagi bahwa penyampaian strategi belajar mengajar PPKn di sekolah selalu didominasi oleh metode ceramah, tanya jawab atau variasi keduanya, sehingga dengan metode ini sangat sulit dicapai pengaktualisasian sikap dan perilaku-perilaku moral sebagaimana yang diharapkan.

Di samping itu sorotan yang sering muncul terhadap materi PPKn yaitu tidak sesuainya teori-teori atau pengetahuan yang diberikan oleh guru di kelas dengan praktek-praktek kehidupan ketatanegaraan secara empiris. Apalagi materi yang dibahas menyangkut kelembagaan negara, pelaksanaan pemilu, sistem kepartaian, demokrasi dan sebagainya. Sebagaimana yang digariskan kurikulum bahwa PPKn merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negaranya.

Kedua hal di atas sebenarnya telah lama dijadikan sorotan. Namun belum menampakkan perubahan yang berarti. Dengan adanya perubahan-perubahan objektif pada era reformasi khususnya reformasi politik yang terjadi pada bangsa ini menjadikan kedua hal di atas menarik untuk dikaji.

Era reformasi telah memberikan kontribusi bagi transparansi hal-hal yang dulunya dianggap tabu atau sakral untuk dikaji, menjadi suatu hal yang dapat didiskusikan secara transparan. Terlebih dengan adanya pencabutan terhadap Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), di mana materi-materi yang diajarkan bersumber pada interpretasi tunggal penguasa Orde Baru kala itu.

Untuk itu makalah sederhana ini bertujuan untuk : *Pertama*, menyingkapi alternatif strategi pengajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi PPKn dengan beberapa perubahan yang diakibatkan adanya reformasi politik. *Kedua*, berupaya mendeskripsikan isu-isu reformasi politik yang dapat memperkaya atau memperdalam materi pengajaran PPKn di sekolah.

B. Alternatif Strategi Pengajaran Moral dalam Kaitannya dengan Reformasi Politik

Reformasi politik secara menyeluruh diartikan sebagai perubahan segenap substansi sistem atau kehidupan politik, baik berupa aspek maupun unsur-unsurnya (Arbi Sanit, 1998). Ini berarti bahwa reformasi politik menyangkut aspek kultur, struktur, proses dan produk dari kehidupan politik Indonesia yang sedang diberlakukan sampai dewasa ini.

Struktur politik Orde Baru yang ditata berdasarkan pemusatan kekuasaan sehingga mengkondisikan sistem politik otoritarian yang oleh *Dwight King* disebut dengan *Birokratik Otoritarian* (Anderson & Kahin, 1982) harus direformasi pada keadaan dimana struktur berdasarkan distribusi kekuasaan secara relatif berimbang. Reformasi kultur politik, dari kultur politik yang dikembangkan dan didasarkan kepada nilai tradisi kekeluargaan yang membuka peluang bagi pengutamaan penggunaan emosi di dalam penentuan sikap dan tingkah laku politik menuju budaya politik kompetitif, dimana nilai dan kepentingan semua pihak diberikan perhatian yang berimbang. Berdasarkan kombinasi tatanan kekuasaan yang terdistribusi secara relatif berimbang dengan budaya politik kompetitif rasional inilah direformasi pula proses politik yang ditandai oleh ciri paternalistik, sentralistik dan kolusif yang kesemuanya memungkinkan tercemarnya proses politik oleh penyalahgunaan

kekuasaan. Dengan kondisi ini sulit mengharapkan produk politik yang memenuhi sebanyak mungkin nilai dan kepentingan warga masyarakat.

Perubahan-perubahan dalam supra dan infra struktur politik tersebut telah diekspos di media massa, baik media massa elektronik maupun media massa lainnya. Kondisi ini memberikan akses yang besar bagi peserta didik untuk mengamati berbagai peristiwa dan memberikan persepsinya sendiri terhadap perubahan-perubahan tersebut. Untuk itu sebagai guru PPKn ada beberapa alternatif strategi pengajaran yang dapat dilakukan.

1. Objektivitas dalam Penyampaian Materi

Dengan tumbangnya Soeharto maka Orde Baru telah menjadi sejarah dan menjadi peristiwa masa lampau. Sebagai sebuah peristiwa sejarah, tumbangnya Soeharto dan Orde Baru itu menjadi penting terutama dengan terjadinya berbagai perubahan dan apa yang kemudian berkembang setelah peristiwanya sendiri menjadi masa lalu.

Kaitannya dengan guru PPKn adalah bahwa dalam penyampaian materi hendaklah dapat memilah-milah secara objektif tentang kejadian-kejadian masa lampau dan mencermati kenyataan masa kini dengan kenyataan-kenyataan yang sesuai dengan apa adanya. Contoh, dalam mengkaji Orde Baru bukan berarti mengkaji segala kebobrokan yang melekat pada rezim ini dan meninggalkan sesuatu yang bisa saja dianggap masih bisa diteruskan/nilai-nilai yang lumayan baik pada rezim ini.

Kongkritnya dapat diberkerkan satu topik pada materi ajar PPKn yaitu "*Toleransi*", khususnya toleransi antar umat beragama. Adalah keliru bahwa agama tidak sekaligus merupakan masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Penafsiran kehidupan beragama secara sekular itulah yang mengurangi peran agama untuk mengontrol tingkah laku politik, sebab mendiktatori sesama manusia bisa dipandang tidak ada hubungannya dengan agama. Ini berarti penginterpretasian yang diberikan penguasa dapat mengurangi alat kontrol yaitu melalui tindakan "menyingkirkan" peran ajaran (nilai) keagamaan di dalam mengawasi kekuasaan politik dan kenegaraan.

2. Menciptakan Iklim Belajar dalam Kelas yang Kondusif Bagi Terjadinya Interaksi Proses Belajar Mengajar

Pembinaan iklim belajar yang kondusif dimaksudkan sebagai usaha memberi kesadaran dan membentuk pola kebiasaan pada peserta didik tentang perilaku-perilaku yang sejalan

dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan upaya ini diharapkan akan tercipta kondisi belajar mengajar yang penuh keintiman, kebersamaan, akrab dan bersahabat. Oleh sebab itu adalah menjadi tugas guru PPKn untuk membina iklim demokratis di dalam kelas dengan menggunakan strategi tepat guna dalam proses belajar mengajar.

Salah satu contoh metoda yang dapat dijadikan acuan adalah model-model pengajaran VCT (klarifikasi nilai). Melalui metoda ini dapat diungkapkan sikap peserta didik terhadap suatu fenomena politik.

3. Mereformasi Diri dalam Bertugas

PPKn sebagai pendidikan moral mempunyai karakteristik yang merupakan sifat-sifat yang dapat membedakannya dari yang lain. Ia menyangkut pembinaan dan penumbuhan moral yang ditampilkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Untuk itu guru menduduki peran yang sentral yaitu bagaimana menumbuhkan moralitas subjek didik.

Dalam kaitannya dengan reformasi politik, maka seorang guru PPKn harus memiliki kapabilitas dalam mereformasi diri, baik dari segi personal, wawasan akademis maupun hubungan interpersonal lainnya.

Kapabilitas personal pada hakekatnya dapat dicermati melalui kualitas moral dan akademis yang dimiliki oleh seorang guru PPKn. Reformasi politik membuka peluang bagi guru untuk mencermati perubahan fenomena politik dan mempelajarinya dengan cermat agar informasi aktual dapat diberikan secara objektif.

C. Beberapa Isu dalam Reformasi Politik dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Materi PPKn

Konsep reformasi politik mengacu kepada proses perubahan secara gradual pada semua aspek kehidupan politik menuju ke pembentukan format politik baru yang lebih demokratis. Pembentukan format politik baru membutuhkan beberapa persyaratan sistemis. *Pertama*, rancang bangun sistem politik yang sejalan dengan kebutuhan tuntutan reformasi, meliputi sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem perwakilan politik, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. *Kedua*, aturan-aturan mengenai mekanisme pelaksanaan seluruh proses politik tersebut. *Ketiga*, perangkat undang-undang politik bagi seluruh proses tersebut (Valina Singka dalam Arbi Sanit, 1998).

Selanjutnya konsep reformasi politik dibagi menurut jangka waktu pencapaiannya yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, agenda reformasi terpenting yang harus segera dilakukan adalah melaksanakan pemilu yang bersih, jujur dan adil sehingga lembaga legislatif yang akan menjadi produknya memiliki keabsahan.

Sedangkan agenda jangka panjang diharapkan pada tahun 2004 nanti reformasi politik dapat mencapai sasaran akhir terbentuknya sistem politik yang benar-benar terkonsolidasi berdasarkan demokrasi. Sistem politik yang mencerminkan kehidupan demokratis akan menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan ekonomi sehingga diharapkan pada abad ke-21 nanti bangsa Indonesia sudah siap memasuki era kompetisi global. Untuk lebih rincinya Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI (LIP FISIP UI) telah mengkonstruksikan beberapa agenda reformasi politik sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini.

AGENDA	Masa Sekarang (ORDE BARU)	Masa Transisi	Masa Normal
<i>Ideologi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penghapusan monopoli interpretasi - Pancasila sebagai alat legitimasi status quo 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghapusan monopoli interpretasi - Penguatan Pancasila sebagai ideologi kerakyatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pancasila ideologi terbuka - Pancasila ideologi nasional milik rakyat
<i>UUD 1945</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ditafsirkan sesuai kepentingan penguasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Amandemen atau tambahan penjelasan pasal-pasal 	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 dengan interpretasi yang solid
<i>MPR</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan 57.5 % - Kekuasaan dibatasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan dikurangi - Berdaulat penuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pengangkatan - Berdaulat penuh
<i>DPR</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan - Dominasi fraksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pengangkatan - Dominasi fraksi dikurangi dengan mengubah tata tertib 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pengangkatan - Fraksi hanya alat administratif
<i>Lembaga Kepresidenan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tanpa batas periode - Tanpa batas kekuasaan - Tidak ada akuntabilitas publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Masa jabatan maksimal dua periode - Pembagian antar cabang kekuasaan - Ada akuntabilitas publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Masa jabatan maksimal dua kali - Pemisahan dan pembatasan kekuasaan - Ada akuntabilitas publik
<i>Kabinet</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hak prerogatif Presiden - Tidak ada rasional struktur dan personal 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi dengan DPR - Seleksi personal yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan DPR untuk struktur dan personal
<i>Partai Politik</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dua parpol dan satu Golkar - Pemerintah mengendalikan parpol 	<ul style="list-style-type: none"> - Multi parpol - Parpol independen 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan alamiah lewat pemilu - Independensi partai
<i>Pemilu</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsional yang di selewengkan - Campur tangan pemerintah dalam proses pelaksanaan pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsional dengan calon perseorangan - Pemerintah tidak lagi campur tangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Institusi yang disempurnakan

AGENDA	Masa Sekarang (ORDE BARU)	Masa Transisi	Masa Normal
<i>DPRD Tk. I dan II</i>	- Bagian dari Pemda - Dikendalikan oleh Pengurus Orpol Pusat	- Perluasan kewenangan dalam pembuatan kebi-jakan penting	- Cabang Legislatif di daerah
<i>Birokrasi Sipil</i>	- Berpolitik secara institusional	- Penghapusan monoloyalitas	- Institusi netral
<i>ABRI</i>	- Alat kekuasaan - Tidak otonom	- Konsolidasi - Mengurangi peran sosial politik	- Institusi netral - Otonom
<i>Sistem Pemerintahan Daerah</i>	- Sentralisasi	- Desentralisasi	- Otonomi Daerah yang luas

Dari beragam agenda reformasi politik di atas, pada masa transisi saat ini telah dihasilkan beberapa produk legislatif sebagai upaya menjalankan apa-apa yang telah diagendakan seperti Ketetapan-ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa MPR 1998 seperti Tap MPR No.X/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/MPR/1978 tentang P4, yaitu Tap MPR tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Nasional, Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang di bidang politik diantaranya UU No.2/1999 tentang Partai Politik, UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum, UU No.4/1999 tentang Keanggotaan MPR, DPR dan DPRD, serta PP No.5 dan 12/1999 tentang Netralitas PNS.

Relevansi beberapa agenda reformasi politik dengan pengembangan materi ajar PPKn adalah sangat signifikan sekali karena pada hakekatnya kesadaran moral yang ingin dicapai dalam pengajaran dan pendidikan PPKn ini adalah bagaimana peserta didik memiliki kesadaran moral berpolitik dalam kaitannya bagaimana ia berperan serta aktif melakoni tugas dan fungsi yang melekat pada dirinya agar dapat menjadi warga negara yang baik, yang dapat menjalankan kewajiban dan hak-hak politiknya. Berikut ini akan dipaparkan beberapa isu dalam reformasi politik yang dirasa penting dalam rangka pengembangan materi ajar PPKn.

1. Reformasi di Bidang Ideologi Negara dan Konstitusi

Monopoli interpretasi tentang Pancasila telah dicabut oleh keluarnya Tap MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Nasional. Pancasila yang selama ini digunakan sebagai alat legitimasi status quo penguasa hendaknya dibebaskan dari

acuan interpretasi penguasa dan dikembalikan pada kebebasan pola pikir rakyat. Reinterpretasi Pancasila sebagai interpretasi politis diperlukan, supaya gambaran tentang bentuk kehidupan yang dianjurkan dan sekaligus mempersatukan, diwujudkan masyarakat secara tepat (Arbi Sanit, 1998).

Kitannya dengan materi ajar PPKn bahwa nilai-nilai interpretasi Pancasila oleh rezim Orde Baru selama ini telah dicabut dan selanjutnya berpedoman pada Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Nasional (Tap MPR No.X/MPR/1998). Kongkritnya dapat dilihat beberapa kelemahan interpretasi tersebut sebagai berikut :

- a. Ajaran tentang kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menggambarkan suatu masyarakat komunal yang otoriter, ternyata telah dimanfaatkan untuk memperkuat negara karena rakyat yang tidak diutamakan menjadi lemah, terkooptasi dan terkontrol secara ketat. Model hubungan yang seperti ini justru melemahkan negara dan sekaligus masyarakat untuk menghadapi tantangan yang datang dari dalam dan luar negeri.
- b. Pengorganisasian negara berdasarkan nilai “kekeluargaan” tampaknya mematok berlakunya prinsip komunalisme, namun menghalangi pemberlakuan prinsip rasionalisme tentang distribusi dan proses penguasaan. Dengan kata lain, penguasa dalam tradisi kekeluargaan adalah pihak yang diistimewakan, berpeluang untuk menjadi orang kuat yang pada gilirannya menjadi otoritarian ataupun oligarkhis.

Sementara itu pensakralan terhadap UUD 1945 hendaknya ditiadakan lagi. Yang tidak boleh dirubah dalam urusan ideologi negara dan konstitusinya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan Pembukaan UUD 1945 itu sendiri, selebihnya dapat diamandemen. Bila dicermati lebih lanjut Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 berisi beberapa kontroversi yang bercirikan ambivalensi di antara prinsip demokrasi universal dengan nilai tradisi tentang kenegaraan dan kekuasaan yang bersifat otoriter. Terdapat beberapa kontradiksi pikiran di dalam UUD 1945 tersebut, seperti mengutamakan kedaulatan rakyat versus negara, mengutamakan pemusatan kekuasaan negara versus distribusi/otonomi, mengutamakan dan mendukung hak istimewa elit penguasa versus populisme. Sedangkan peluang demokrasi antara lain diatur dalam pasal 27 sampai dengan 34. Peluang otoriter diberikan oleh pasal-pasal yang mengatur kekuasaan presiden, yang rinciannya tidak diseimbangkan dengan pasal-pasal yang mengatur DPR/MPR dan Mahkamah Agung (yudikatif). Dalam prakteknya kenyataan ini diperkuat oleh penolakan penguasa akan penerapan prinsip pemisahan

kekuasaan *Trias Politica*. Kepentingan penguasa akan efektivitas serta kelanggengan kekuasaan menyebabkannya memanfaatkan peluang otoritarian UUD 1945.

Untuk itu beberapa upaya perlu dilakukan, yang diantaranya adalah mengamandemen pasal-pasal yang cenderung bersifat dan kondisionalkan suasana otoritarian. Kemudian mempertegas tatanan kekuasaan berdasarkan perimbangan kekuatan, pemisahan dan pembagian kekuasaan serta pengawasan terhadap kekuasaan penguasa. Upaya ini amat mendesak dilakukan agar konstitusi yang dipraktekkan dalam kehidupan bernegara tidak terjerumus ke dalam jebakan interpretasi yang tidak demokratis.

Guru PPKn dalam hal ini harus memiliki kompetensi dalam menjembatani apa-apa yang dimaksud pada konstitusi negara dengan keadaan objektif/kenyataan yang riil dalam tataran empirisnya.

2. Isu Demokratisasi

Agenda reformasi politik jangka panjang yang akan dicapai dan dituju oleh bangsa ini adalah tercapainya suatu keadaan sistem politik, baik supra maupun infra struktur politik, kultur politik, proses dan produk kehidupan politik ke arah format politik yang demokratis. Proses pencapaian ke arah itu dikenal dengan upaya demokratisasi.

Demokratisasi adalah sebuah proses tanpa akhir untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik (Maswardi Rauf, 1998). Demokrasi menjadi kata kunci yang diperjuangkan banyak negara dunia di awal abad ke-21 ini. Hal ini disebut *Huntington* dengan *The Third Wave of Democratization* (Gelombang Demokrasi Ketiga) Yang telah kita rasakan dan melanda Indonesia.

Gelombang awal demokratisasi ditunjukkan oleh fakta politik ambuknya negara kuat Orde Baru. Turunnya Soeharto dari piramida kekuasaan Orde Baru merupakan pintu gerbang utama yang mengantarkan masyarakat politik Indonesia memasuki transisi awal menuju demokrasi. Bagaimana wujud/karakter dari pemerintahan demokrasi itu ? Afan Gaffar (1990) menjelaskan lebih lanjut. *Pertama*, adanya akuntabilitas. Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan apa yang hendak dan telah ditempuhnya. Dalam konteks ini si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut "*public scrutiny*", terutama yang dilakukan oleh mass media. *Kedua*, adanya rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan haruslah ada, yang dilakukan secara teratur dan dengan cara damai. *Ketiga*, adanya rekrutmen

politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya peluang orang untuk mengisi jabatan politik hanyalah dimiliki oleh segelintir orang saja. *Keempat*, adanya pemilu yang bebas dan dilaksanakan secara teratur. *Kelima*, masyarakat menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Termasuk di dalamnya hak menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menyatakan dan menentukan preferensi politiknya tentang suatu masalah sehingga dapat menentukan suatu agenda politik. Hak untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dengan aktif di berbagai organisasi tanpa dihalang-halangi oleh siapapun dan institusi manapun. Kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang demokratis mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu sepanjang dalam lingkup tidak bertentangan dengan kode etik pers.

Indikator-indikator di atas mencerminkan bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang universal. Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik atau yang dikenal dengan istilah "*procedural democracy*". Dalam artian yang normatif demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam level empirik, demokrasi akan tampil menurut bentuk atau tipe-tipe yang bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan konteks sosio kultural yang melingkupi sistem politik. Atas pertimbangan itu, Gabriel A. Almond misalnya mengidentifikasi dua sistem demokrasi yaitu Anglo-Amerika dan Eropa Kontinental. Perbedaan ini tidak ditentukan dari tempatnya yang berbeda, tetapi berdasarkan derajat homogenitas budaya politik dan derajat diferensiasi peran. Sistem Anglo-Amerika dikatakan punya budaya politik yang relatif homogen dan tingginya derajat diferensiasi peran. Sebaliknya, demokrasi Eropa Kontinental dilingkupi oleh tingginya derajat fragmentasi budaya dan rendahnya diferensiasi peran. Hubungan antara warga negara dengan organisasi-organisasi politik juga berbeda. Dalam demokrasi ala Eropa Kontinental, organisasi-organisasi politik lebih banyak berbasis pada sekte-sekte ketimbang partai politik yang modern. Sebaliknya demokrasi Anglo-Amerika jauh

lebih maju, modern dan stabil, karena nilai-nilai dan struktur yang berkembang dalam masyarakat secara fundamental mengkondisikan input sistem politik (Gabriel A. Almond, 1956).

Untuk Indonesia dalam level empirik telah dilakukan tiga tipe demokrasi yaitu *representative democracy*, pemerintahan Soekarno dengan *guided democracy* dan pemerintahan Orde Baru dengan *Pancasila democracy (?)* Membicarakan demokrasi di Indonesia kita tidak bisa terlepas dari ketiga praktek demokrasi di atas. Dalam menganalisis bagaimana Demokrasi Pancasila dipraktekkan pada masa Orde Baru dapat dicermati melalui indikator pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Pertama, dapat dilihat bahwa kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik. Lembaga tersebut merupakan pembentuk dan penentu agenda politik, sosial dan ekonomi nasional. Presiden mampu mengontrol rekrutmen politik, memiliki sumber daya keuangan yang tidak terbatas dengan melalui *budgetary process* yang ketat, yang tidak memungkinkan DPR melakukan pengontrolan terhadap *budgetary process* tersebut, dan disamping itu Soeharto sendiri memiliki *legacies* yang tidak dimiliki siapapun seperti Supersemar, Bapak Pembangunan, Pangti ABRI dan lain-lainnya.

Kedua, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi, kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah.

Ketiga, rekrutmen politik tertutup. *Political recruitment* merupakan proses pengisian jabatan politik dalam pemerintahan negara termasuk di dalamnya adalah baik dalam jabatan eksekutif, legislatif dan jabatan lembaga tinggi negara lainnya. Padahal dalam negara yang demokratis untuk mengisi jabatan politik tersebut, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama.

Keempat, dalam melaksanakan pemilu sepanjang berkuasanya rezim Orde Baru belum bisa dikatakan demokratis. Fungsi pemilu masih terbatas untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Pemilu pada masa itu tidak berhasil menciptakan pemerintahan yang kredibel dan responsibel terhadap kepentingan masyarakat (J. Kristiadi, 1997).

Dengan kondisi objektif yang tercermin dalam indikator-indikator di atas dapat dijadikan semacam analisis dalam mengembangkan materi ajar PPKn.

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan pada pokok bahasan "*Musyawarah Mufakat*", penyelesaian masalah yang diarahkan melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu ciri khas demokrasi di Indonesia. Tetapi betulkah demikian kenyataannya ? Dalam tataran

empiris sepanjang praktek politik Orde Baru nilai-nilai musyawarah dan mufakat mengalami pensakralan nilai oleh rezim kala itu. Bila dicermati model negosiasi dan pembuatan keputusan seperti itu pada masa Orde Baru sudah terbukti sangat bersifat formalistik. Kuatnya peran pemimpin sebagai pengarah dan perumus keputusan dirasakan sekali sehingga anggota rapat tidak mempunyai kedaulatan yang sama dengan pemimpinnya. Memang dari segi teknik, hal ini memungkinkan efisiensi proses politik, tapi hasil selanjutnya adalah membuka peluang bagi dominasi pemimpin. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu contoh penerapan sistem kekeluargaan yang secara emosional sangat menghargai peranan “pemimpin” sebagai bapak di dalam keluarga besar Indonesia. Dengan kondisi ini muncullah segala sesuatunya dilakukan *Asal Bapak Senang (ABS)*. Musyawarahpun telah dipolitisir menjadi sarana legitimasi rezim kala itu.

Atas dasar hal itu sudah selayaknya kompetisi menggantikan musyawarah untuk mufakat (Arbi Sanit, 1998), persamaan atau perimbangan nilai dan kepentingan kelompok, golongan, organisasi dan institusi menggantikan pendahuluan kepentingan negara, masyarakat, bangsa terhadap individu dan golongan.

Lalu bagaimana prospek demokrasi setelah proses transisi kelak ? Bila dicermati pada masa transisi menuju demokrasi dilakukan beberapa upaya pendemokratisasian yang cukup elegan oleh rezim Habibie. Habibie secara elegan telah mempromosikan liberalisasi politik. Liberalisasi politik antara lain dilakukan dengan memberikan kebebasan tumbuhnya partai-partai baru, melepaskan para tahanan politik yang dipenjara oleh Orde Baru, membuka kran kebebasan pers, membiarkan pembentukan oposisi, memperluas otonomi kampus, kampanye pemberantasan KKN dan sebagainya. Hal-hal di atas merupakan indikator permulaan lahirnya iklim demokrasi di Indonesia. “Bayi” demokrasi telah lahir namun ia belum bisa merangkak apalagi untuk mengharapkan ia bisa berjalan.

Oleh karena itu sudah waktunya dilakukan secara serius proses demokratisasi sistem politik Indonesia dengan menggulirkan secara cepat agenda-agenda reformasi politik yang telah disusun. Satu yang pasti, sebagai langkah pendek adalah melaksanakan pemilu sebagai sarana demokratisasi di Indonesia.

3. Isu Pemilu

Masa transisi yang sedang dialami oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini menimbulkan berbagai macam masalah yang harus segera ditanggulangi. Untuk itu satu-

satunya langkah awal atau pintu ke luar permasalahan ini adalah menyegerakan pelaksanaan pemilu. Di samping itu pemilu juga dijadikan indikator paling penting bagi ada atau tidak adanya kehidupan politik yang demokratis.

Menurut Riswandha Imawan (1999), semasa Orde Baru belum pernah terwujud pemilu yang benar-benar demokratis. Hal ini diakibatkan oleh : *Pertama*, sosialisasi yang salah mengenai fungsi pemilu. *Kedua*, keinginan membangun sistem politik yang monolitik.

Sosialisasi yang salah mengenai pemilu dapat dicermati antara lain : *Pertama*, memberi gambaran kepada masyarakat bahwa pemilu merupakan “pesta pora” demokrasi sehingga masyarakat menilai pemilu bersifat seremonial. *Kedua*, meletakkan pemilu di belakang rencana pembangunan nasional, sehingga pemilu lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi segala hal yang telah dilakukan pemerintah. *Ketiga*, konsep *floating mass* diartikan sebagai larangan warga masyarakat untuk ikut menjadi anggota atau sekedar memilih partai politik di luar yang ditentukan oleh pemerintah.

Keinginan membangun sistem politik monolitik oleh Orde Baru dapat dilihat melalui beberapa indikator. *Pertama*, pembatasan jumlah partai politik yang boleh mengikuti pemilu. *Kedua*, politisasi birokrasi, yang justru menguatkan sifat alamiah birokrasi Indonesia yang otoriter. *Ketiga*, agenda terselubung dalam aktivitas birokrasi terutama saat mendekati pelaksanaan satu pemilu. *Keempat*, pemanfaatan semaksimal mungkin lima pilar sumber otoritarianisme Orde Baru yakni represi fisik, klientalisme ekonomi, penggunaan mekanisme *stick and carrot*, mekanisme politik uang dan membangun jaringan korporatisme negara.

Indikator-indikator di atas menunjukkan bagaimana nuansa pemilu yang dipraktikkan Orde Baru. William Liddle (1992) secara menarik mengilustrasikan hal tersebut. Menurut Liddle :

“Pemilu-pemilu Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Pemilu itu dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu, namun juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi “partai milik pemerintah”.

Sebentar lagi (lebih kurang satu bulan lagi) pemilu di era reformasi digelar. Wacana publik yang berkembang adalah seputar sistem pemilu yaitu *proportional representation* versus sistem distrik.

Di dalam ilmu politik sistem pemilu diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara dimana warga masyarakat memilih para wakil mereka (Lijphart, 1995). Sistem pemilihan merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi perwakilan. Hal ini

dikarenakan oleh dua hal : *Pertama*, sistem pemilihan membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap proporsionalitas dari hasil pemilu, juga terhadap sistem kepartaian. Sistem pemilihan juga menentukan macam kabinet yang akan dibentuk, akuntabilitas dan derajat keutuhan dan kesatuan partai politik. *Kedua*, sistem pemilihan merupakan dimensi yang paling mudah diutak-atik dibanding dengan elemen lain dari demokrasi yaitu apabila seseorang hendak mengubah wajah demokrasi dalam sebuah negara misalnya dengan mengubah sistem pemilihan dari sistem perwakilan berimbang menjadi sistem distrik.

Sistem distrik ini dalam literatur ilmu politik lebih dikenal dengan nama seperti *plurality elections, first past-the post electoral system, relative majority elections, single member constituency/district* atau wilayah pemilihan (sesuai dengan banyaknya kursi yang diperebutkan). Biasanya dasar dari pembagiannya adalah jumlah penduduk, luas atau besarnya wilayah sama sekali tidak menentukan. Untuk sebuah distrik hanya diperebutkan satu kursi di lembaga perwakilan. Karena satu distrik hanya berhak untuk satu wakil, maka calon yang memperoleh suara pluralitas (suara terbanyak) dalam distriknya menang. Hal ini dinamakan *the first past the post* (Miriam Budiardjo, 1992). Dalam sistem ini untuk tampil sebagai pemenang, partai-partai yang bersaing hanya dituntut memperoleh suara lebih banyak daripada saingannya, tanpa ada ketentuan minimal berapa selisih yang harus diraih. Kursi lembaga perwakilan di suatu distrik diperoleh oleh partai yang mendapat suara terbanyak, sedangkan suara-suara yang diperoleh partai lain (kendati jika dijumlahkan ternyata lebih besar dari perolehan partai pemenang) akan dianggap hilang (*wasted*) dan tidak dapat dihitung untuk membantu partainya di distrik lain.

Karena sistem menghitung perolehan suara menyebabkan banyak suara *wasted*, maka sistem distrik sering dianggap oleh (terutama partai-partai kecil dan minoritas) tidak representatif karena tidak memberikan peluang yang cukup bagi partai-partai yang kecil untuk muncul atau *survive*. Kritik lain yang sering diajukan adalah tingginya tingkat *distorsi effect* karena ada suatu pengakuan terhadap prinsip bahwa yang menang akan ambil semua atau *the winner takes all*.

Hal yang positif dari sistem ini adalah wakil yang dipilih melalui cara ini erat hubungannya dengan warga yang memilihnya, dia lebih berorientasi pada kepentingan distrik serta kepentingan warga ketimbang kepentingan partai atau kepentingan nasional.

Sistem *proportional representation (multy member constituency)* didasarkan pada gagasan bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu kontestan pemilihan adalah sesuai jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan, sebab setiap kursi bisa diraih dengan jumlah perolehan suara

tertentu. Sistem pembagian dan penentuannya dapat pula bervariasi, ada negara yang menggunakan sistem proporsional dengan sistem *d'hont* dan ada pula negara yang menggunakan sistem sisa terbanyak (*the largest remainder system*).

Dalam sistem ini yang berperan adalah partai politik. Partai akan menentukan calon dan bahkan jadi tidaknya seseorang menjadi anggota badan legislatif (melalui *list system*). Kritik yang mendasar dari sistem ini adalah yang berkaitan dengan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ini memungkinkan pemerintah menjadi tidak stabil apalagi kalau banyak partai yang *survive* sehingga kemungkinan untuk membentuk eksekutif sangat berat, karena harus didasarkan atas koalisi beberapa partai atau dua dan tiga partai besar.

Kelebihan sistem proporsional merupakan sistem yang mampu menciptakan parlemen menggambarkan karakteristik masyarakat dan sangat positif dari kemungkinan pemberian peluang pada partai kecil untuk *survive*. Hal ini disebabkan sepanjang partai tersebut mampu memenuhi sejumlah *electoral quotient* yang telah ditentukan, maka akan tetap punya wakil di parlemen. Di samping itu kelebihan lain yang menonjol dari sistem ini adalah lebih mencerminkan watak bangsa karena semua kekuatan politik yang ada ditampung dalam sebuah wadah yang bernama parlemen.

Untuk lebih jelasnya dapat diklarifikasikan perbedaan antara kedua sistem tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini.

UNSUR	Proposional Murni	Distrik Murni
Daerah Pemilihan	1. Basis wilayah 2. Ukuran besar 3. Jumlah daerah pemilihan sedikit	1. Basis penduduk 2. Ukuran kecil 3. Jumlah daerah pemilihan banyak
Wakil	4. Lebih dari satu daerah pemilihan 5. Asal wakil bebas 6. Hubungan dengan pemilih melalui partai politik 7. Kurang/tidak dikenal pemilihnya 8. Dicalonkan oleh partai 9. Pengawasan pemilih kurang 10. Bertanggung jawab kepada partai	4. Hanya satu daerah pemilihan 5. Ada ketentuan domisili 6. Hubungan dengan pemilih langsung atau melalui partai 7. Diawasi oleh pemilih 8. Dicalonkan oleh pemilih dan partai 9. Pengawasan pemilih kuat 10. Bertanggung jawab kepada pemilih
Suara	11. Tidak ada suara yang hilang 12. Mayoritas mutlak (di atas 50%)	11. Ada suara yang hilang 12. Mayoritas sederhana (bisa di bawah 50%)
Partai Politik	13. Menguntungkan partai kecil 14. Cenderung multipartai 15. Kekuasaan besar terhadap wakil 16. Organisasi partai setingkat desa	13. Merugikan partai kecil 14. Cenderung bipartai 15. Kekuasaan kecil terhadap wakil 16. Organisasi partai setingkat desa
Organisasi Pelaksana	17. Bersifat otonom	17. Bersifat otonom
Sistem Pemerintahan	18. Mengarah ke pemerintahan koalisi 19. Sentralisasi	18. Tidak mengarah ke pemerintahan koalisi 19. Desentralisasi

Sumber : LIPI (1997)

Dalam pemilu tahun 1999 nati telah dicantumkan secara tegas di dalam UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat 7 bahwa pemilu dilaksanakan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.

Persoalan utama pada pemilu Orde Baru bukan semata terletak pada sistem pemilihan yang proporsional tapi pada praktek pelaksanaannya yang dengan jelas terlihat kuatnya dominasi dan intervensi pemerintah, baik dalam struktur maupun proses pemilihan umum yang menafikan partisipasi dan pengawasan langsung rakyat.

Untuk itu pengetahuan-pengetahuan tentang pemilu, baik itu *electoral laws* maupun *electoral process* hendaknya dipahami semua warga masyarakat terlebih bagi guru PPKn yang akan memberikan pengajaran pada peserta didik tentang bagaimana hubungan antara negara dan warga negara terutama berupaya menjadikan peserta didik sadar akan politik.

D. Penutup

Banyak agenda di dalam reformasi politik yang harus dipahami oleh kita semuanya dalam rangka menuju transisi demokrasi di negeri ini. Pendeskripsian agenda reformasi politik jangka panjang dan jangka pendek dalam makalah ini diharapkan dapat menjadi *starting point* untuk mendiskusikan agenda-agenda reformasi politik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, Akhmad Zaini (ed.), 1990, *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Solo : Ramadhani.
- Almond, Gabriel, 1956, Comparative Political System dalam *Journal of Politics No.18*.
- Al-Chaidar, 1998, *Reformasi Prematur : Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, Jakarta : Darul Falah
- Anderson, Benedict & Audrey Kahin, 1982, *Interpreting Indonesian Politics*, Cornel Modern Indonesia Project.
- Budiardjo, Miriam, 1992, Sistem Pemilu dan Pembangunan Politik dalam *Jurnal Ilmu Politik Nomor 11*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Bourchier, David & John Legge, *Democracy in Indonesia 1950's and 1990's*, Australia : Monash University.
- E. Kast, Fremond & J. E. Rosenzwich, 1970, *Organization and Management*, Tokyo : Mac Graw Hill Kogakusha.

Hal Hill, 1994, *Indonesia's New Order*, Australia : National Library.

Imawan, Riswandha, 1999, Mengharap Pemilu yang Demokratis dalam *Pudang Ekspres*.

Lijphart, Arend, 1995, *Democracies*, New Haven : Yale University Press.

Rauf, Maswadi, 1998, Demokrasi dan Demokratisasi : Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia dalam *Seri Penerbitan Studi Politik Nomor 2*, Bandung : Mizan – LIP FISIP UI.

Sanit, Arbi, 1998, *Reformasi Politik Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum.

PERENCANAAN PENGAJARAN PPKN

DISAMPAIKAN PADA PENYULUHAN PENGAJARAN
BIDANG STUDI PPKN BAGI GURU-GURU SMU SWASTA
KOTAMADYA PADANG

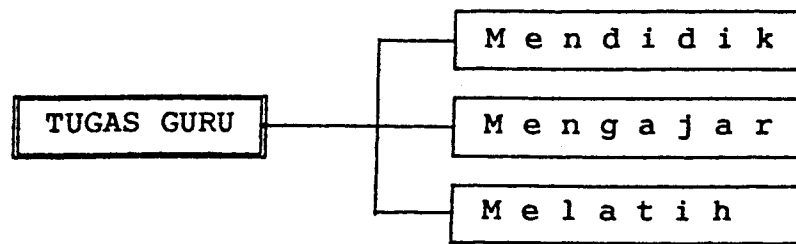
OLEH

DRA. AINA

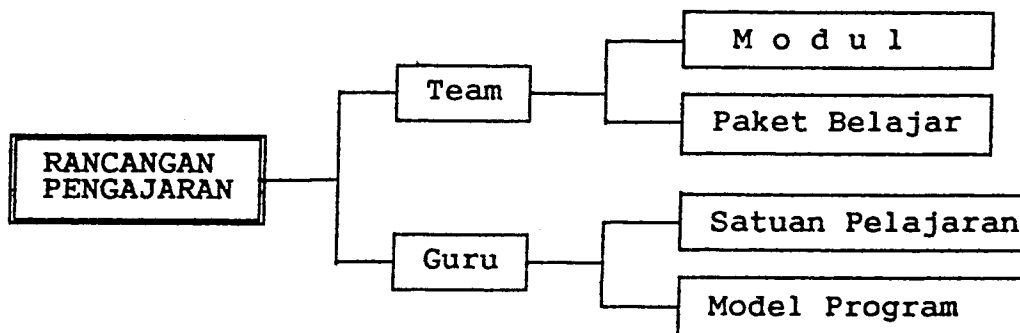


PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
IKIP PADANG
1999

PERENCANAAN PENGAJARAN



Guru dalam mengajar menggunakan kurikulum. Kurikulum adalah benda mati, oleh sebab itu perlu diberi jiwa sehingga ia bisa menjadi hidup / berfungsi.



Pengembangan Kurikulum =====> Membuat Rencana Pengajaran



Syaratnya :

1. Pengetahuan teoritis tentang belajar.
2. Penguasaan bahan.
3. Sikap meningkatkan pembelajaran.
4. Keterampilan mengajar =====> TEACHING SKILL.

TEACHING SKILL :

1. PLANNING : - WRITING OBJECTIVE (TKP/TIK).
- LEARNING EXPERIENSIS (pengalaman belajar).

2. IMPLEMENTING (pelaksanaan) :
 - PRESENTATION (penyajian).
 - CLASSROOM MANAGEMEN (pengelolaan kelas).
 - INTERPERSONAL COMUNICATION - IBM.
 - QUESTIONING SKILL (keterampilan bertanya).
3. EVALUATING
 - EVALUASI - test.
 - OBSERVASI - non test.

**POLA PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAJARAN
(DISAIN INSTRUKSIONAL)**

Disain Instruksional ialah disain yang memuat rincian komponen pengajaran atau disain (rancangan) yang memuat rekayasa teknisi pendidikan (a.l.guru) dalam mengoperasionalkan GBPP suatu program bidang studi (mata pelajaran). Dari disain ini, siap dipindahkan (dengan atau tanpa perubahan/penyesuaian) ke dalam berbagai bentuk model persiapan (sp.model program, modul, paket belajar).

Disain Instruksional terdiri dari dua komponen besar yaitu :

- A. Disain program yang memuat rekayasa pengembangan liputan Bahan / Materi Pelajaran (BMP) meliputi :
 1. Pokok Bahasan.
 2. Sub Pokok Bahasan.
 3. Bobot Taksonomik.
 4. Target Konsep, Nilai, Moral, Norma.
 5. Liputan BMP.
 6. Rumusan TKP.
- B. Strategi Belajar Mengajar & Pola Evaluasi yang memuat komponen sebagai berikut :
 - 1 Alternatif pilihan Metoda.
 2. Alternatif pilihan Media Pengajaran.
 3. Alternatif pilihan sumber.
 4. Alternatif pilihan Pola Evaluasi.

1. POKOK BAHASAN.

Komponen ini sepenuhnya taqlik kepada GBPP, dalam pengertian bahwa apa yang tersurat dipindahkan/disalin ke dalam disain Instruksional. Kewajiban profesional guru dalam mengelola komponen ini adalah :

- a. Menelaah makna, isi pesan dari PB untuk bahan pengembangan komponen selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan mengkaji Tujuan Kurikulum & TIU/TPU serta hal yang tersirat dalam PB yang bersangkutan dan kemudian mempertautkannya dunia dan diri pesertadidik.
- b. Menelaah PB/SPB cawu sebelumnya atau cawu berikutnya atau dengan bidang studi lain yang menunjang sehingga terjadi kesinambungan dan keterkaitan yang serasi.

2. SUB POKOK BAHASAN (SPB).

Segala SPB yang dimuat dalam GBPP dipindahkan dengan catatan bahwa perlu dikaji lagi tata urutannya kelengkapannya yang mungkin kurang memadai baik dilihat dari segi keilmuan, kependidikan ataupun kondisi peserta didik dan lingkungan belajarnya. oleh sebab itu saat pengembangan komponen ini dilakukan :

- a. Pengkajian kelengkapan dan kelayakan SPB yang ada dengan memperhatikan hasil kajian tema, isi pesan PB. para pengembang berkewajiban untuk meluruskan dan menyempurnakannya sesuai dengan penilaiannya, dengan ketentuan :
 - (1) Tidak mengurangi SPB yang dituntut GBPP.
 - (2) Menambah SPB baru dengan maksud memberikan perluasan/pengayaan.
- b. Mereorganisir sikuen SPB baik dari segi keilmuan maupun segi kepentingan kemudahan bagi peserta didik.

3. BOBOT TAKSONOMI (BOTAKS).

Secara teori dalam kependidikan bahwa diri pribadi manusia itu terdiri dari tiga kawasan yaitu : kawasan kognitif, afektif dan psikomotor. Masing-masing kawasan ini mempunyai

taksonomi (tingkat urutan) yang menunjukkan tinggi rendahnya pengembangan/kemampuan kawasan tersebut pada seseorang. Sebagai acuan kiranya patut diingat target-target yang seyogianya dicapai guru pada setiap domain seperti dibawah ini :

a. Kawasan kognitif, hendaknya mengutamakan pembinaan :

(1) Kemampuan memproses informasi/konsep menjadi milik dirinya sendiri dan dipahaminya, dimengerti dan diyakininya serta terstruktur secara baik/layak.

(2) Kemampuan diatas hendaknya diproses melalui pola berpikir kritis, analitis, interaktif dan evaluatif (berpikir secara nalar), rasional.

b. Kawasan afektif seharusnya dibina :

(1) Kepekaan dan keterlibatan seluruh potensi afeksinya untuk merasakan, menghayati, dan berkemauan menyerap.

(2) Sistem nilai dibina melalui pola klasifikasi, sehingga nilai/moral baru yang masuk akan diterimanya secara baik mampu bersatu raga (personalized) dengan sistem nilai yang sudah ada dalam dirinya. Siswa akan mampu melakukan ini bila nilai/moral baru itu merupakan keyakinan atau kepercayaannya.

c. Kawasan psikomotor hendaknya pembinaan :

(1) melalui pola proses/presudarat latihan atau melakoni (EXPERIENCING) baik secara langsung (secara pisik) maupun secara gerak terarah secara abstrak.

(2) aneka keterampilan melalui pola diatas melahirkan gerak / keterampilan yang manipulatif dalam arti gerak keterampilan hasil belajar (learned behavior) dan bukan lagi gerak keterampilan yang reflektif / kodrat.

Ketiga domain diatas merupakan suatu kesatuan yang utuh, bulat dimana satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi.

Bobot taksonomi ini biasanya dilambangkan dengan angka persentase yang akan menuntun kejelasan pengembangan komponen berikutnya. Misalnya dari suatu PB/SPB menunjukkan hasil persentase sebagai berikut : kognitif 30 % , afektif 40% , psikomotor 30%. Contoh ini memberi makna bahwa afektif meru-

pakan bobot tumpuan PB yang bersangkutan dan domain lain seimbang. PB ini menuntut kualitas materi pelajaran dan KBM yang multi dimensional untuk membina ketiga domain yang diminta. Baik TKP/TIK maupun materi pelajaran untuk afektif hendaknya lebih banyak jika dibandingkan dengan kawasan lainnya, demikian pula halnya butiran evaluasinya kelak. Perbandingan jumlah TPK maupun butir materi pelajaran (BMP) ataupun item soal. Hendaknya primadona metoda berada pada metoda afektif yang kemudian dipariasi dengan metoda kognitif dan psikomotor.

4. TARGET KONSEP, NILAI, MORAL dan NORMA

Sama halnya pada bagian 3 diatas, komponen inipun relatif baru dalam pengembangan kurikulum, namun amat strategis bagi para teknisi dan pelaksana program, karena dengan adanya komponen ini maka :

- a. Kelayakan keutuhan isi dan pesan pelajaran bisa dipelihara. Pelajaran tidak hanya menyampaikan konsep atau data/fakta atau teori atau pengetahuan yang kognitif semata, melainkan juga menyampaikan isi pesan atau semangat jiwa (Mean and values) yang termuat dalam konsep/tiori/pengertian tersebut. Isi pesan mana diliputi dengan label NILAI dan MORAL dan merupakan masukan untuk memberlajarkan potensi afektif peserta didik. Konsep atau teori dan isi pesan tersebut juga dikaji dan dikembangkan norma ketentuan (aturan pengikat/aturan mainnya) serta tata cara pelaksanaannya untuk bahan masukan membelajarkan potensi psikomotorik.
- b. Para teknisi dan pelaksanaan program akan mendapatkan gambaran dan arah liputan pelajaran secara lebih jelas, lengkap dan terarah, sehingga pada saat mengembangkan lingkup liputan BMP, target-target ini akan menuntunnya. PB dan SPB tidak mungkin disalah tafsirkan atau salah penjabarannya serta tidak akan disampaikan secara parsial hanya konsep atau normanya saja, melainkan utuh, terarah,

jelas. Masalah-masalah diatas merupakan titik lemah pola pengajaran kita dimasa lalu sehingga melahirkan keanekaragaman isi liputan pelajaran, kebingungan pelaksana tentang makna isi dan liputan pelajaran. Kualitas guru dan sifat politis penduduk Pancasila amat membutuhkan tuntutan kejelasan liputan serta sasaran pelajarannya. Untuk pemahaman umum perlu dipahami istilah-istilah dibawah ini :

K O N S E P : ialah nama/label/sebutan atau rumusan dari sesuatu atau sejumlah hal (fakta, kejadian, keadaan) yang memiliki ciri dan kualifikasi atau fungsi peran. Contoh ; Nama orang, binatang, benda, keadaan, warna, senang, susah, panas, dingin.

Haji Mukhsin ialah konsep, yakni orang yang bercirikan keha-jian dan memiliki ciri fisik, psikis tertentu.

Sejajar dengan konsep dan merupakan masukan untuk membela-jarkan potensi kognitif ialah : pengetahuan, teori, generalisasi ilmu, dalil ilmu, dalil agama dan hukum atau norma.

N I L A I : ialah harga/kualifikasi/karakter dari suatu konsep atau isi pesan atau semangat jiwa yang termuat baik secara tersurat maupun tersirat dalam suatu konsep. Nilai ialah sesuatu yang berharga/tidak berharga, mengacu kepada peringkat kualifikasi indah, baik, benar, adil. Dari contoh Haji Mukhsin diatas maka tersirat nilai/kualifikasi atau perkiraan karakter orang ini, misalnya Muslim, alim, sabar, shaleh dan lain-lain.

KUALIFIKASI NILAI ADA DUA :

1. **NILAI YANG IDIIL - OBJEKTIF - UNIVERSAL - ABADI**

Yaitu nilai-nilai yang idiil yang sukar dilukiskan dan dicapai selengkapnya, yang diterima dan ada pada setiap waktu dan tempat/umat dan kekal (selalu ada), adil, indah, benar, iman, shalih dan lain-lain adalah jenis nilai, ini ada sepanjang waktu dan dimanapun dan amat sukar dilukiskan atau dicapai secara sempurna. Tatanan nilai agama, falsafah, da-

lil, dogma adalah nilai ideal.

2. NILAI YANG SUBJEKTIF - KHUSUS, yakni nilai sub 1 yang sudah mempunyai warna khusus dan subjektif yang sifatnya kontekstual, kondisional / situasional, temporer dan subjektif. NIKMAT misalnya secara ideal - objektif sukar digambarkan manusia. NIKMATNYA SIMISKIN ATAU SIKAYA adalah nilai subjektif khusus.

M O R A L: Moral ialah sikap dan perilaku atau perbuatan / penampilan yang menjadi kiprah umum/kelompok/seseorang, diharapkan atau diyakini atau digandrungi keberadaannya / keterwujudannya oleh masyarakat / kelompok / orang dimana kita berada serta mengikat kita. Karenanya moral selalu mengacu kepada sesuatu / seperangkat nilai (moralita) dan merupakan keterikatan atau keharusan yang tidak kompromi dengan tahu atau tidak, mau atau tidak, sadar atau tidak sadar. Moral merupakan suatu keharusan atau kelayakan atau kewajiban.

MORAL PANCASILA adalah sikap perilaku atau amal perbuatan manusia dan masyarakat/bangsa/negara Indonesia yang berasaskan tatanan nilai Pancasila yang diharapkan, dianut, diyakini dan dilaksanakan siapapun, yang hidup dalam lingkungan manusia, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Orang yang bermoral, yakni orang yang mampu menampilkan sikap perilaku yang sesuai dengan keharusan, harapan, keyakinan dan kelayakan lingkungan hidupnya. Orang yang bermoral Pancasila ialah orang yang memahami dengan nalar konsep-konsep Pancasila dan meyakini nilai-nilai yang tersirat di dalamnya serta berperilaku sesuai dengan pemahaman dan keyakinan tersebut. KAPANKAH HAL INI TERJADI ? Jawabnya ada di tangan guru PPKN khususnya.

N O R M A: ialah perangkat hukum, aturan prinsip/asas dan tata prosedur (tata cara) pelaksanaan atau pengamalan yang dijadikan aturan main atau pola pikir dan sikap serta perbuatan. KONSEP-NILAI-MORAL Pancasila akan harus memakai

NORMA INDONESIA. Sikap perilaku manusia Indonesia wajib menggunakan norma Pancasila.

5. LIPUTAN BUTIR MATERI PELAJARAN

Liputan butir materi jangan bersifat parsial (sebagian), tidak mono disiplin dan tidak mono gatra/aspek dan jangan hanya mono kawasan dan taksonomik. Kualifikasi yang layak bagi Pendidikan Pancasila yakni MULTI DIMENSIONAL, yakni tuntutan agar materi atau bahan pelajaran hendaknya meliputi berbagai:

- a. Bahan masukan yang mambelajarkan berbagai potensi kawasan dan ranah.
- b. Disiplin (cabang) keilmuan yang sesuai dengan tema dan kelayakan TPK/TIK.
- c. Gatra kehidupan yang sesuai dengan TPK.
- d. Sumber bahan pelajaran yang mengundang berbagai pilihan krgiatan belajar siswa yang berkadar tinggi.
- e. Berbagai liputan kelengkapan BMP mulai dari data ==> fakta ==> konsep ==> generalisasi ==> teori atau dalil yang selanjutnya digali dan dikaji tatanan nilai dan moralnya serta dikaitkan dengan norma acuannya.
- f. Liputan tempat mulai dari kehidupan di rumah, sekitar sekolah, desa dan regional, wilayah - nasional - dunia.
- g. Dimensi waktu kemarin - kini - esok.

6. TUJUAN PENGAJARAN KHUSUS / TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
(T P K - T I K)

Tujuan instruksional ini biasa disebut "performance objectives". ELY dan GERLACH (1971) mendefinisikan tujuan instruksional ini sebagai suatu deskripsiperubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang memberi petunjuk bahwa suatu proses belajar telah berlangsung. BRIGGS (1977) mengatakan bahwa tujuan instruksional ialah suatu pernyataan tentang apa yang harus dapat dilakukan siswa, atau tentang tingkah laku yang bagaimana yang diharapkan dari siswa setelah ia menyelesaikan suatu program instruksional tertentu. Jadi tu-

juan instruksional ini harus menunjukkan tingkah laku akhir atau hasil perbuatan (PRODUCT) yang dituntut dapat dilakukan siswa sebagai bukti usaha belajarnya telah berhasil.

Ada dua macam tujuan insruksional yaitu TIU atau terminal PERFORMANCE OBJECTIVES dan TIK atau ENABLE OBJECTIVES. TIU menyatakan tingkah laku yang harus diperlihatkan oleh siswa pada saat berlangsung pada akhir suatu kegiatan instruksional. TIK ialah sub tujuan instruksional yang menyatakan tingkah laku yang sangat penting yang harus dapat dilakukan siswa supaya ia dapat mencapai tujuan akhir atau tujuan umum. TIK ini harus dijabarkan berdasarkan TIU dan harus dapat mendukung tercapainya TIU.

MENGAPA TUJUAN INSTRUKSIONAL ITU PERLU ?

Tujuan instruksional ini sangat penting dalam proses instruksional atau dalam setiap kegiatan belajar mengajar sebab tujuan instruksional yang dirumuskan dengan spesifik dan jelas akan memberikan keuntungan kepada :

- a. SISWA, sebab dengan adanya tujuan instruksional tsb siswa dapat mengatur waktu, energi, dan pemusatan perhatiannya pada tujuan yang akan dicapai.
- b. GURU, sebab dengan adanya tujuan instruksional tersebut akan dapat mengatur kegiatan instruksionalnya, metodenya, dan strateginya untuk mencapai tujuan tsb.
- c. EVALUATOR, dengan adanya tujuan instruksional tersebut, evaluator dapat menyusun tes sesuai dengan apa yang harus dicapai siswa.

PERSYARATAN TKP / TIK

1. TIK harus mengandung kegunaan bagi siswa.
2. TIK harus konsisten pada PB.
3. TIK harus operasional (dapat dicapai siswa).
4. TIK harus dengan tingkat kematangan siswa.
5. TKP/TIK harus multi domein.
6. TKP/TIK harus sikuensial.
7. TKP/TIK harus memuat kondisi yang diinginkan.
8. TKP/TIK harus menggunakan kata-kata operasional.

**MEMFUNGSIONALISASIKAN STRATEGI
BELAJAR MENGAJAR PPKn
MELALUI METODA VCT**

**Disampaikan Pada Penyuluhan Pengajaran Bidang Studi PPKn
Bagi Guru-Guru SMU Swasta di Kotamadya Padang
Tanggal 17 April 1999**



Oleh :

Drs. SURYANEF

**LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
PADANG
1999**

MEMFUNGSIONALISASIKAN STRATEGI BELAJAR MENGAJAR PPKn MELALUI METODE VCT

A. Pendahuluan

Sudah bukan rahasia lagi bila beban pendidikan moral dan akhlak di sekolah-sekolah di letakkan tanggung jawabnya pada guru Pendidikan Agama dan PPKn. Bila terjadi kenakalan, keributan, bahkan tindakan kriminal yang sering dituding adalah gurunya yang tidak "*benar*" mengajarkan moral dan akhlak.

Kita tentu saja tidak bisa menerima hal tersebut, karena banyak faktor yang bisa dijadikan penyebab. Satu hal yang pasti dan pantas diakui adalah banyak dari kita yang secara sadar atau tidak kurang memberikan porsi yang besar pada segi "*mendidik*" dalam proses belajar mengajar. Menurut A.G. Soejono (1992 : 45-46) tugas guru tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pendidik dan pelatih. Guru sebagai pengajar adalah penyaji dan penyalur ilmu. Sebagai penyalur ilmu, guru harus memiliki ilmu yang luas dan mendalam, jauh melebihi yang diperlukan muridnya. Guru sebagai pendidik dalam arti ia harus mampu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Sedangkan sebagai pelatih, seorang guru harus dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada anak didik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu bidang studi yang lebih mengutamakan aspek afektif dan tingkah laku (Psycomotor). Untuk itu guru PPKn tidak saja dituntut menguasai materi yang akan disampaikan, melainkan juga yang lebih penting adalah menguasai berbagai strategi metoda dan teknik penyampaian materi tersebut agar peran pendidik moral dapat berfungsi secara optimal.

Permasalahannya adalah sering terjadi pemilihan strategi belajar mengajar yang menitikberatkan pada aspek kognitif saja dan kurang dapat menjangkau aspek afektif maupun psikomotor. Pada makalah yang sederhana ini, penulis ingin mengungkapkan metoda VCT sebagai salah satu strategi belajar mengajar yang dapat lebih menonjolkan pemilihan sikap dan prilaku dan tidak hanya penguasaan materi semata. Untuk itu selanjutnya akan dibahas : pengertian dan jenis strategi belajar mengajar PPKn dan bagaimana upaya memfungsionalisasikan strategi belajar mengajar melalui metoda VCT tersebut.

B. Pengertian dan Jenis Strategi Belajar Mengajar PPKn

Untuk memahami pengertian strategi belajar mengajar PPKn seharusnya kita telah mengerti strategi, belajar mengajar dan seterusnya pengertian Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Strategi menurut Webster Dictionary diartikan sebagai “cara-cara dalam melaksanakan proyek, cara dalam mencapai suatu tujuan, metoda dan juga diartikan sebagai rencana (Plan).

Walaupun dalam Webster Dictionary tersebut strategi disamakan artinya dengan metoda namun sebenarnya strategi itu lebih luas dari metoda. Strategi merupakan kumpulan dari sejumlah metoda/cara/pola dalam mencapai/melaksanakan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan metoda merupakan kumpulan sejumlah teknik dan teknik adalah taktik atau cara kerja. (Djahiri, 1985 : 28). Disamping pengertian strategi ada lagi yang lazim kita kenal dengan Pendekatan (approach). Pendekatan diartikan dengan pola/dasar berfikir atau kerangka berfikir dalam menghadapi/mengerjakan sesuatu.

Keempat istilah tersebut yaitu pendekatan, strategi, metoda dan teknik saling berkaitan. Pendekatan akan menentukan strategi. Strategi yang digunakan akan menentukan pula metoda dan teknik. Metoda dan teknik inilah yang lebih berperan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Belajar mengajar adalah dua kata yang sering beriringan. Istilah tersebut menyangkut pekerjaan guru dan murid dalam mencapai tujuan pengajaran. Belajar ialah proses interaksi antara manusia (aku/ego) dengan lingkungannya atau dengan fakta/konsep/teori (Djahiri, 1978 : 227). Interaksi di sini dalam arti proses internalisasi dari pada sesuatu keadaan diri siswa yang dilakukan secara aktif dimana setiap panca indera siswa ikut berperan.

Bila siswa berinteraksi dengan sesuatu misalnya dengan panca indera siswa melihat kecelakaan lalu lintas, tetapi dengan proses itu tidak terjadi internalisasi maka hal tersebut tidak dapat dikatakan dengan belajar. Akan tetapi bila dengan pengamatannya terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut membawa pengaruh terhadap dirinya, misalnya dengan melihat peristiwa tersebut dia menyadari akan perlunya hati-hati dalam berlalu lintas, maka hal tersebut telah menunjukkan adanya proses belajar.

Pengertian belajar di atas jelas bukan hanya menyangkut interaksi siswa dengan guru atau sebaliknya, tetapi lebih luas dari itu yaitu siswa dengan

lingkungannya. Lingkungannya itu mungkin berupa fakta atau konsep dan mungkin juga telah berbentuk teori.

Kebanyakan pada sekolah-sekolah sekarang terjadi adalah :

- a. Guru berinteraksi dengan buku kemudian guru dengan murid.
- b. Murid dengan buku-buku (prosentasenya masih kecil)

Mengingat hal itu, maka peranan guru perlu ditingkatkan sehingga proses belajar itu dapat terjadi secara maksimal. Apalagi pengajaran affektif itu lebih menghendaki interaksi dengan lingkungan lainnya, seperti peristiwa-peristiwa, ceritera, gambar dan lainnya (sebagai bahan stimulus). Proses belajar mengajar seperti poin a dan b di atas akan lebih banyak unsur kognitifnya.

Mengajar tidak lain dari pada pelaksanaan fungsi dan perencanaan guru serta usaha guru ke arah melaksanakan prinsip-prinsip belajar agar apa yang dinyatakan dalam tujuan instruksional pelajaran dapat dicapai dengan sempurna (Djahiri, 1978 : 50). Mengajar menjadikan anak (siswa) belajar. Mengajar tidak sama dengan berdiri di muka kelas sambil bicara atau hanya sekedar menyampaikan sejumlah pengetahuan atau ilmu menurut apa yang dituntut oleh kurikulum. Guru sebagai pengajar dituntut untuk benar-benar berdaya upaya, merencanakan dan mengeluarkan segala potensi dirinya untuk membina siswa-siswanya menjalani proses belajar secara baik, sehingga tujuan dapat tercapai.

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn) adalah bidang studi yang muncul berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 sebagai pengganti bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Djahiri (1978 : 5) PKN baru khas Indonesia, ialah PKN yang difokuskan dan didasarkan kepada jiwa, nilai dan moral Pancasila serta UUD 1945. Jadi bukan hanya mewarganegarakan siswa secara baik dan benar saja, melainkan juga memPancasilakan warga negara yang baik tersebut. Warga negara yang baik belum tentu Pancasilais. Yang diPancasilakan ialah wataknya, sifatnya, ucapan dan amalnya.

Bidang studi PPKn lebih menitikberatkan kepada segi pembinaan watak, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Fokus dari pada belajar adalah konsep yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi yang disajikan bersumber pada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN (sekarang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Nasional).

Strategi belajar mengajar banyak jenis ragamnya. Menurut Weiny (1986 : 17) jenis strategi belajar mengajar dapat diklasifikasikan kepada :

- a. Berdasarkan bentuk pendekatannya.
- b. Berdasarkan pengelompokkan siswa.
- c. Berdasarkan kecepatan belajar masing-masing siswa.
- d. Berdasarkan pengelompokkan menurut kemampuan siswa
- e. Berdasarkan pengelompokkan menurut kesamaan minat siswa
- f. Berdasarkan pengelompokkan menurut kecepatan belajar siswa
- g. Berdasarkan domein-domein tujuan (kognitif, affektif, psykomotor).

Strategi belajar mengajar mana yang akan digunakan terutama ditentukan oleh tujuan instruksional umum yang telah dirumuskan. Strategi belajar mengajar yang telah ditetapkan untuk digunakan dijabarkan lagi ke dalam metoda-metoda dan seterusnya dijabarkan lagi ke dalam teknik-teknik yang lebih operasional. Dengan memperhatikan teknik inilah media pengajaran dapat ditetapkan/ditentukan.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metoda yang akan digunakan diantaranya adalah :

1. Faktor siswa, terutama kemampuan dan jumlah siswa.
2. Faktor efektifitas dan effisiensinya.
3. Faktor kemampuan guru.
4. Fasilitas yang tersedia.
5. Situasi dan kondisi lingkungan belajar.
6. Materi yang akan disampaikan.
7. Tujuan yang hendak dicapai.

Melihat kepada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam bidang studi PPKn dan materi yang akan disajikan maka strategi/metoda yang paling efektif dalam pelajaran PPKn adalah strategi/metoda belajar mengajar pendidikan affektif. Hal ini bukan berarti strategi/metoda yang lain tidak dapat digunakan. Metoda-metoda untuk kawasan kognitif dan psykomotor tetap digunakan karena tidak ada satu pokok bahasan yang hanya berada dalam kawasan afektif saja. Alternatif metoda untuk membina masing-masing aspek (kawasan) yang dapat kita pedomani dalam memilih metoda pengajaran adalah seperti yang dikemukakan oleh Djahiri (1985 : 55) sebagai berikut :

Kawasan Kognitif	Kawasan Afektif	Kawasan Psykomotor
1. Ceramah murni	1. Bermain peran	1. Simulasi
2. Tanya jawab	2. V C T	2. Latihan
3. Diskusi	3. Simulasi	3. Percontohan
4. Studi dokumenter	4. Permainan	4. Demonstrasi
5. Ekspositori	5. Studi proyek	5. Studi proyek
6. Inkuiri	6. Tanya jawab nilai	6. Sosidrama
7. Studi proyek	7. Inkuiri nilai	7. Karyawisata
8. Simulasi	8. Percontohan	8. Inkuiri
9. Catat dan tulis	9. Partisipatorik	9. Dll.
10. Dll.	10. Sosidrama dll.	

Metoda yang ampuh untuk kawasan kongnitif belum tentu ampuh untuk kawasan lainnya.

Dalam membina/mengungkapkan sikap/nilai/moral (pengajaran afektif) menurut Douglas Superke ada delapan pendekatan. Kedelapan pendekatan itu adalah :

1. Pendekatan Evocation/evokasi (ekspresi spontan).
2. Pendekatan Inculcation (Sugestif terarah).
3. Pendekatan Awareness atau kesadaran.
4. Moral Reasoning atau mencari/menentukan kejelasan moral.
5. Pendekatan Analysis atau analisis nilai.
6. Value Clarification atau pengungkapan diri.
7. Commitment Approach atau pendekatan kesepakatan.
8. Union Approach atau mempersatukan/mengintegrasikan diri.

Kedelapan pendekatan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan VCT. Mengingat hal tersebut dan oleh karena VCT sanga baik untuk kawasan afektif, maka pada makalah ini yang dibicarakan khusus mengenai VCT.

C. Upaya Memfungsionalisasikan Strategi Belajar Mengajar Melalui Metoda VCT

1. Pengertian VCT

VCT singkatan dari Value Clarifikation Technique yang kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti teknik mengklasifikasikan nilai.

Mengklasifikasikan dapat diartikan memperjelas, mengungkap, memperinci atau juga bisa diartikan membina atau mengembangkan. Nilai

yang terjemahan dari value menurut asal katanya (value) berarti baik atau kuat. Dari pengertian dasar ini kemudian diperluas menjadi “segala sesuatu yang disenangi, diinginkan, dicita-citakan dan disepakati” (Djahiri 1979 : 5).

Menurut Meltau Rakiah nilai adalah suatu kepercayaan atau keyakinan (belief) yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai apa yang patut dilakukan oleh seseorang atau mengenai apa yang berharga dan tidak berharga (Djahiri, 1979 : 6).

Nilai yang merupakan aspek/masalah kejiwaan menjadi standar penuntut perilaku dalam menentukan baik buruknya sesuatu, berharga atau tidaknya, patut atau tidak patutnya dilakukan oleh seseorang.

Nilai dapat dibedakan atas beberapa jenis diantaranya nilai estetis, nilai etnis, nilai keagamaan, nilai hukum, nilai ekonomis, nilai sosiologis, nilai moral, nilai historis, dll. Semua jenis nilai itu bila dilihat dari sifatnya dapat dibedakan lagi atas nilai individual, nilai umum dan nilai riil. Dilihat dari segi waktu berlakunya nilai terdiri nilai temporer dan nilai abadi. Suatu hal yang patut kita pahami mengenai nilai adalah bahwa nilai dapat mengalami pasang naik dan pasang surut. Pada suatu waktu mungkin sesuatu nilai (misalnya percaya dan taqwa kepada Tuhan) tinggi frekwensinya pada seseorang tetapi pada waktu yang lain dia menurun atau sebaliknya. Oleh karena itu guru PPKn harus dapat menyusun strategi yang dapat membina nilai secara terus menerus, sehingga proses penurunan tidak terjadi. Sifat lain dari nilai yang erat kaitannya dengan penyusunan strategi adalah bahwa nilai dapat saling meradiasi. Meradiasi itu tidak saja antar nilai yang ada dalam diri kita tetapi juga antara sistem nilai yang dianut oleh seseorang dengan sistem nilai yang dianut oleh orang lain. Aplikasi dari sifat ini adalah guru harus dapat menciptakan lingkungan yang baik disekolah dan berusaha menciptakan lingkungan yang menunjang dimasyarakat terutama keluarga.

2. Strategi Belajar Mengajar yang Berpolakan VCT

Untuk memahami strategi belajar mengajar yang berpolakan VCT dapat dipedomani bagan yang terdapat pada lampiran. Pada bagan tersebut terlihat beberapa fase yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yaitu :

a. Fase Persiapan

- 1) Persiapan program yang lengkap terperinci yang memuat :
 - TIU topiknya/Sub pokok bahasan dalam kurikulum.
 - Pengembangan TIK dari TIU diatas
 - Pengembangan materi bahan pelajaran per TIK
 - Penentuan pilihan metoda VCT yang akan dipergunakan serta medianya.
 - Penentuan pokok bahasan yang akan dievaluasi.
- 2) Dari butir-butir diatas tadi, guru yang akan ber-VCT diminta menentukan TARGET NILAI (DESIRED VALUES) yang ingin dicapai/dibina/ditanamkan pada siswanya dalam topik tersebut. Target nilai ini bisa dicari dari TIU, TIK dan pokok materi topik tersebut. Target nilai inilah yang akan menuntun kita dalam menyusun bahan, pertanyaan serta menilai respon (Tanggapan) dari para siswa kelak (a.l jawaban, kegiatan atau hasil kegiatan laporan). Tanpa memiliki ini VCT kurang berarti, kunci VCT justru disini, pembinaan dan penanaman nilai yang sepatutnya.
- 3) Keharusan menentukan/mencari/membuat stimuli yang merupakan hasil manipulasi (perubahan, penjelmaan) dari pada TIK, materi pelajaran dan target nilai. Stimuli ini dapat berupa; pertanyaan, cerita petikan atau karangan guru yang dicocokkan dengan materi TIK dan target, gambar/foto atau lain-lainnya. Karena VCT merupakan metoda pembinaan sikap/nilai maka stimulus ini harus mampu menyentuh dan menggerakkan perasaan atau hati siswa serta mengundang ke arah mengungkap/mengklasifikasikan perasaan/nilai dirinya serta mampu menciptakan suasana belajar aktif (CBSA).

b. Fase Pelaksanaan Pengajaran

Stimulus ini akan dimainkan baik dengan bimbingan pengarahan guru ataupun langsung oleh para siswa itu sendiri. Hal ini tergantung pada pilihan jenis VCT kita.

Dalam proses ini terjadi dialog potensi manusiawi pada siswa serta dialog antara siswa (mungkin juga siswa-siswa) dan siswa dengan fakta (konsep) stimulus. Informasi pengetahuan pasti terangkat dalam dialog itu

namun mungkin dalam bentuk lain. Yaitu berbentuk ungkapan bahasa harian atau terapan. Guru perlu melakukan pencatatan/monitoring atas ungkapan-ungkapan ini untuk kelak menjadi bahan pangkal tolak penyimpulan. Fase penyimpulan merupakan fase-fase redifinisi (merumuskan kembali) ungkapan bahasa terapan ke dalam bahasa ilmu, fase pengarahan dan penglurusan hal yang kurang tepat/keliru serta melengkapi semua hal yang dirasakan kurang dari target nilai. Dan materi pelajaran, CBSA meminta agar sejauh mungkin fase inipun dilakukan secara demokratis bersama siswa.

Dalam bagan kita dimuka juga nampak keharusan guru memelihara dan menciptakan suasana belajar yang manusiawi dan kondisional. Dalam arti memelihara suasana yang bebas-objektif-motivatif namun serius. VCT yang diawali oleh wajah guru yang murung atau menyeramkan atau lontaran caci maki serta ejekan akan tidak berhasil. Sebab VCT meminta agar siswa sama sekali tidak merasa takut dan tertekan. Mereka santai namun serius (penuh keinginan dan kesungguhan) karena tertarik serta merasakan dirinya/kebutuhannya tersentuh. Suasana kondisional dalam arti guru memperhatikan dan merubah siasat bila perlu kalau keadaan (tempat, waktu, suasana) berubah/berlainan dari keinginan atau dugaan kita.

c. Fase Evaluasi

Pada bagan kami rentetkan/satukan dengan PBM, sebab sebagaimana kami utarakan dimuka dalam VCT evaluasi dapat dilaksanakan selama PBM itu sendiri. Melalui alat yang ada pada teknik/metode belajar mengajar itu sendiri. Melalui alat yang ada pada teknik/metoda belajarnya (antara lain jawab pertanyaan, laporan, tanggapan dan lain-lain).

Tentunya untuk ini guru diminta sudah mempersiapkan secara rapi, sehingga siswa tidak merasa atau tidak mengetahui bahwa mereka dinilai. Hal ini merupakan salah satu keuntungan besar dari pada CBSA umumnya dan VCT khususnya.

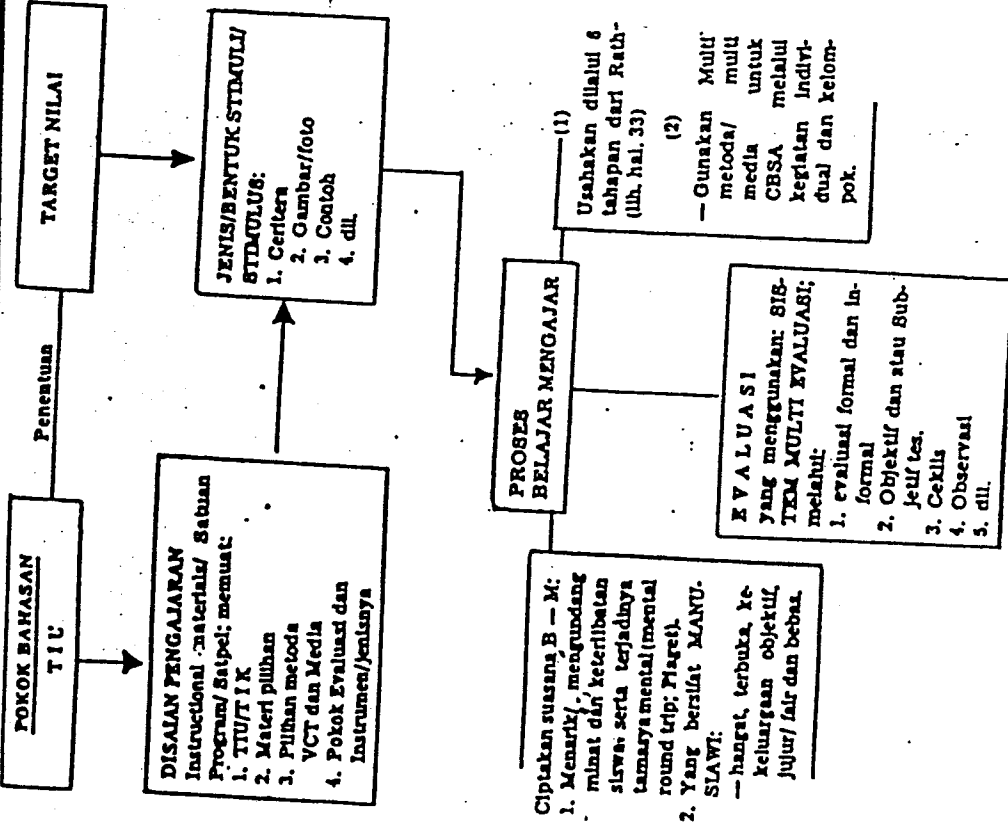
Satu hal lagi yang ingin kami ingatkan kepada guru PPKn yang akan ber-VCT ialah bahwa proses belajar mengajar VCT tidak perlu seluruhnya selesai di kelas.

D. Penutup

Melalui metoda VCT diharapkan strategi pengajaran yang bertumpu pada aspek kognitif perlahan bergeser ke arah aspek affektif dan psykomotor. Mengfungsionalisasikan strategi belajar mengajar PPKn melalui penggunaan metoda VCT merupakan suatu upaya dan beragam metoda yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan dan menggali nilai/sikap/moral yang dimiliki oleh para siswa.

**BAGAN GAMBARAN VCT SECARA TRANSAKSIONAL
(PROSES B - M):**

Dalam gambar ini diperjelas apa yang harus terjadi pada saat PBM VCT berlangsung.



Catatan:

1. Antara TIU-TIK dengan Target Nilai dan Materi berkesinambungan.
2. Sub 1 tsb menentukan pilihan VCT dan Media/ Stimulus serta bentuk pilihan jenis evaluasinya.
3. Ambillah satu Pokok Bahasan PMP/PPSPB kemudian cobalah buat Cetak Biru (Disain/ skenario) lengkap dan terperinci seperti bagan tsb yang siap pakai (untuk mengajar).